

**MODEL ANALISIS KOMPOSISI PENGELUARAN PUBLIK
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS WEB DALAM
MENDUKUNG GOOD GOVERNANCE : STUDI EMPIRIS
KABUPATEN KOTA DI INDONESIA
TAHUN 2011- 2014**

**NANO PRAWOTO
AGUS TRI BASUKI**

ABSTRAKS

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja daerah untuk pendidikan dan kesehatan diharapkan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah daerah wajib menuntaskan pendidikan dasar bagi masyarakatnya yaitu pendidikan gratis selama 9 tahun, dan bagi daerah yang telah memenuhi 9 tahun maka perlu ditingkatkan menjadi pendidikan gratis selama 12 tahun dan melanjutkan program Indonesia Sehat yaitu melindungi kesehatan warganya melalui BPJS atau asuransi kesehatan lainnya. Karena dengan meningkatnya lama sekolah dan kesehatan berdampak pada sumber daya manusia masyarakat meningkat dan akhirnya pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Investasi daerah diharapkan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga pemerintah pusat melalui pemerintah daerah wajib mengkondisikan iklim ekonomi yang kondusif. Dan diharapkan Opini BPK terhadap LPKD memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, diharapkan peran pemerintah pusat melalui BPK sangatlah penting dalam mengendalikan penyelewengan keuangan daerah, sehingga berdampak pada kinerja daerah dan akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci : pertumbuhan ekonomi, good governance, dan kebijakan fiskal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada dasarnya pembangunan regional tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan pembangunan nasional, salah satu sasaran pembangunan nasional Indonesia adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan, termasuk didalamnya pemerataan pendapatan antar daerah (wilayah). Untuk mencapai sasaran di atas bukanlah pekerjaan ringan karena pada umumnya pembangunan ekonomi suatu daerah berkaitan erat dengan potensi ekonomi dan karakteristik yang dimilikinya.

Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam membangun, pembangunan nasional Indonesia lima tahun ke depan perlu memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antarkelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antarsektor ekonomi dan antarwilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan (RPJMN 2014-2019).

Selanjutnya penjabaran TRISAKTI (LIHAT RPJMN Pemerintahan Jokowi) diwujudkan dalam bentuk:

1. **Kedaulatan dalam politik** diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai, dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa.
2. **Berdikari dalam ekonomi** diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat dalam mengambil

keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran negara untuk memenuhi hak dasar warga negara.

3. **Kepribadian dalam kebudayaan** diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada tiga masalah pokok, yakni: (1) merosotnya kewibawaan negara; (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional; dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa Kelemahan Sendi Perekonomian Bangsa.

Lemahnya sendi-sendi perekonomian bangsa terlihat dari belum terselesaikannya persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antarwilayah, kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan ketergantungan dalam hal pangan, energi, keuangan, dan teknologi. Negara tidak mampu memanfaatkan kandungan kekayaan alam yang sangat besar, baik yang mewujud (*tangible*) maupun bersifat non-fisik (*intangible*), bagi kesejahteraan rakyatnya. Harapan akan penguatan sendi-sendi ekonomi bangsa menjadi semakin jauh ketika negara tidak kuasa memberi jaminan kesehatan dan kualitas hidup yang layak bagi warganya, gagal dalam memperkecil ketimpangan dan ketidakmerataan pendapatan nasional, melanggengkan ketergantungan atas utang luar negeri dan penyediaan pangan yang mengandalkan impor, dan tidak tanggap dalam menghadapi persoalan krisis energi akibat dominasi alat produksi dan modal korporasi global serta berkurangnya cadangan minyak nasional.

Pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama yaitu meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat local, dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif membangun daerahnya. Oleh karena itu pemerintah daerah harus berupaya menggunakan sumber daya yang ada di daerah tersebut dengan sebagaimana mestinya untuk kemakmuran rakyat banyak dan mendorong perekonomian untuk maju.

Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dengan perencanaan dan pengawasan pengeluaran negara/daerah maka akan berdampak pada kondisi perekonomian yang diharapkan

yaitu kesejahteraan masyarakat. Untuk mengurangi kebocoran APBN atau APBD maka pemerintah perlu melakukan pengawasan dengan bantuan KPK dan BPK. kebijakan fiskal (APBN/APBD) memiliki fungsi :

- a. **Fungsi perencanaan**, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.
- b. **Fungsi pengawasan**, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.
- c. **Fungsi alokasi**, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- d. **Fungsi distribusi**, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
- e. **Fungsi stabilisasi**, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Selain dengan perencanaan dan pengawasan APBN/APBD dalam mempengaruhi kondisi perekonomian, investasi juga dapat diandalkan untuk menciptakan strategi pembangunan Pro Growth, Pro Poor dan Pro Job.

Arsyad menjelaskan bahwa setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif membangun daerah. Pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada berupaya menginventarisir potensi sumber daya ada untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Kesungguhan pemerintah dalam membangun daerah ini diukur dengan adanya suatu sistem pemerintahan yang dikenal dengan istilah Otonomi daerah. Untuk mendukung hal itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang 22 Nomor Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang No.32 Tahun

2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004.

Undang-undang tersebut merupakan landasan bagi daerah untuk membangun daerahnya secara mandiri dengan lebih mengandalkan kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah. Undang-undang ini juga memberikan kewenangan yang lebih besar (*local discretion*) kepada daerah untuk merancang berbagai program pembangunan yang sesuai dengan keinginan masyarakat setempat (*local needs*).

Penelitian ini diharapkan dapat membuktikan peranan pengeluaran pemerintah daerah terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, Kelautan dan Perikanan dan, Investasi serta opini BPK terhadap LKPD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat menciptakan efektivitas dalam pembangunan ekonomi daerah dan terciptanya *good governance*.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah diatas maka dapat kita rumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah Untuk Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Seberapa besar pengaruh antara antara Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Seberapa besar pengaruh antara antara Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Seberapa besar pengaruh antara antara jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Seberapa besar pengaruh antara Opini BPK terhadap LPKD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
6. Dan bagaimana kebijakan yang akan dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Ingin mengetahui hubungan antara Pendapatan Asli Daerah Untuk Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Ingin mengetahui hubungan antara antara Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Ingin mengetahui hubungan antara antara Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Ingin mengetahui hubungan antara antara jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Ingin mengetahui hubungan antara Opini BPK terhadap LPKD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
6. Strategi yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

D. URGENSI PENELITIAN

Pengeluaran pembangunan ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan yang anggarannya selalu disesuaikan dengan besarnya dana yang berhasil dimobilisasi. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu dan bagaimana proporsinya terhadap penghasilan nasional. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Tapi hendaknya kita sadari bahwa proporsi pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional bruto (GNP) adalah suatu ukuran yang sangat kasar terhadap kegiatan peranan pemerintah dalam suatu perekonomian. Sebagai gambaran, kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah seringkali bersifat virtual dalam jangka pendek atau tidak dirasakan masyarakat karena aktivitas ekonomi dalam jangka pendek relatif tidak berpengaruh, dan dalam jangka panjang, dimensi keadilan sosial ekonomi dari buruknya aransemen kebijakan fiskal jelas akan membebani masyarakat dari berbagai sendi kehidupan. Persoalannya adalah bahwa rincian kebijakan yang ada di dalam APBN/APBD sering kali tidak menunjukkan arah kebijakan dan menjadi program *guidelines* yang dapat memberikan peluang-peluang stimulasi bagi aktivitas perekonomian dan sektor swasta. Sebagian besar dari komponen kebijakan yang ada di dalamnya justru didominasi oleh unsur-unsur tidak produktif dan tidak dinamis.

Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut, pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan besar, yaitu: (1) peranan alokasi, mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien; (2) peranan distribusi pendapatan atau kekayaan; dan (3) peranan stabilisasi perekonomian (Mangkoesobroto, 2001)

Peranan stabilisasi perekonomian sangat penting dilakukan karena keadaan perekonomian tidak selalu sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemerintah maupun masyarakat. Tingkat inflasi yang tinggi, pengangguran dan neraca pembayaran luar negeri

yang terus menerus defisit merupakan beberapa gejala ekonomi makro yang tidak dikehendaki bangsa manapun di bumi ini. Oleh karena masalah tersebut secara langsung menyangkut variabel-variabel ekonomi agregat dan hanya dapat diatasi dengan mengendalikan jalannya perekonomian sebagai suatu keseluruhan, maka salah satu kebijakan yang diperlukan adalah kebijakan fiskal.

Kebijakan fiskal yang ditempuh oleh pemerintah ditunjukkan oleh besarnya APBN/APBD yang diperlukan sebagai suatu pedoman sehingga kegiatan pemerintah itu dapat mencapai hasil yang optimal dan dapat mengadakan pertimbangan dalam menjalankan aktivitas-aktivitas pemerintah. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dalam pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian.

Sebagai daerah yang sedang berkembang, dimana peranan pemerintah daerah dalam perekonomian relatif besar, pengeluaran pemerintah daerah praktis dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi pada umumnya, bukan saja karena pengeluaran ini dapat menciptakan berbagai prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, tetapi juga merupakan salah satu komponen dari permintaan agregat yang kenaikannya akan mendorong produksi domestik.

Anggaran belanja rutin memegang peranan yang penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Sedangkan pengeluaran pembangunan ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan yang anggarannya selalu disesuaikan dengan besarnya dana yang berhasil dimobilisasi. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu dan bagaimana proporsinya terhadap penghasilan nasional. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Tapi hendaknya kita sadari bahwa proporsi pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional bruto (GNP) adalah suatu ukuran yang sangat kasar terhadap kegiatan peranan pemerintah dalam suatu perekonomian. Sebagai gambaran, kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah seringkali bersifat virtual dalam jangka pendek atau tidak dirasakan masyarakat karena aktivitas ekonomi dalam jangka pendek relatif tidak berpengaruh, dan dalam jangka panjang, dimensi keadilan sosial ekonomi dari buruknya aransemen kebijakan fiskal jelas akan membebani masyarakat dari berbagai sendi kehidupan. Persoalannya adalah bahwa rincian kebijakan yang ada di dalam APBN/APBD sering kali tidak menunjukkan arah kebijakan dan menjadi program guidelines yang dapat memberikan peluang-peluang stimulasi bagi aktivitas perekonomian dan sektor swasta.

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat dalam mengkaji efektifitas pengeluaran pemerintah daerah terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga dapat menciptakan strategi pembangunan yang pro poor, pro job dan pro growth.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Prof. Simon Kuznets, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya. Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen: Pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan idiologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat (Jhingan, 2000:57).

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dimana penekanannya pada tiga hal yaitu proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu "proses" bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.

B. Pandangan Boediono

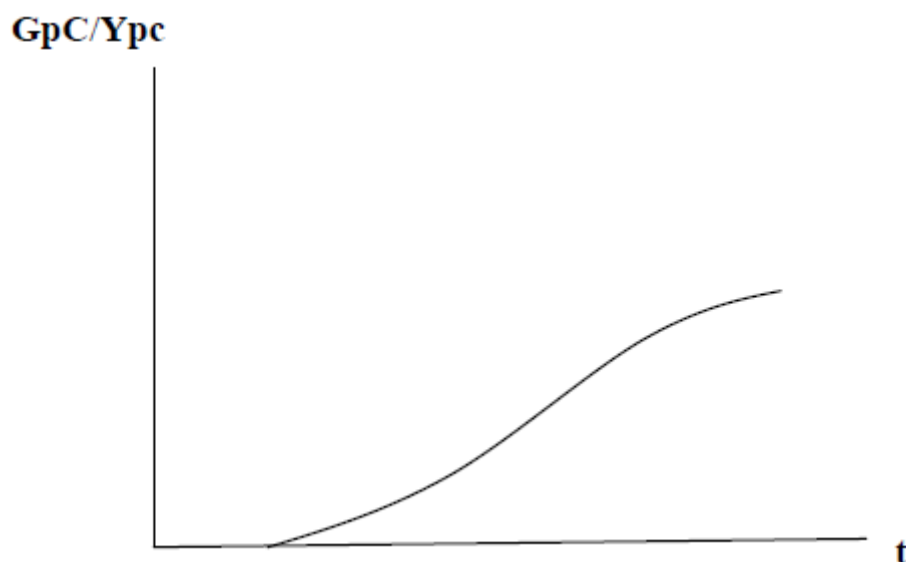
Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan "output perkapita". Dalam pengertian ini teori tersebut harus mencakup teori mengenai pertumbuhan GDP dan teori mengenai pertumbuhan penduduk. Sebab hanya apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan output perkapita bisa dijelaskan. Kemudian aspek yang ketiga adalah

pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang, yaitu apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapita menunjukkan kecenderungan yang meningkat (Boediono, 1992:1-2).

C. Pandangan Adolp Wagner

Menurut hasil pengamatan empiris Adolp Wagner terhadap negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke-19 menunjukkan bahwa aktivitas pemerintahan dalam perekonomian cenderung semakin meningkat (*law of ever increasing state activity*). Wagner mengukurnya dari perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional. Menurut Wagner, ada beberapa hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat yaitu, tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi dan ketidak efisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah.

Secara grafik rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional (GpC/YpC) ditunjukkan oleh kurva eksponensial sebagaimana terlihat pada gambar berikut :



Gambar 2.1

Rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional,
berdasarkan hukum Wagner

Menurut hukum Wagner, pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan hubungan antara industri-industri, industri-masyarakat, dan sebagainya akan semakin rumit dan kompleks sehingga potensi terjadi kegagalan pasar dan eksternalitas negatif semakin besar. Sejalan dengan itu sebagaimana ditunjukkan dalam gambar II.1. secara relatif peranan pemerintah akan semakin meningkat (Mangkoesoebroto,1993:171).

D. Pandangan W.W. Rostow dan Musgrave

W.W. Rostow dan Musgrave menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, rasio investasi pemerintah terhadap total investasi, atau dengan perkataan lain rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional adalah relatif besar. Hal ini disebabkan karena pada tahap awal ini pemerintah harus menyediakan prasarana.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi agar tetap dapat lepas landas. Bersama dengan itu porsi pihak swasta juga menjadi meningkat. Peranan pemerintah masih tetap besar disebabkan oleh pada tahap ini banyak terjadi kegagalan pasar yang di timbulkan oleh perkembangan ekonomi itu sendiri. Banyak terjadi kasus eksternalitas negatif, misalnya pencemaran lingkungan yang menuntut pemerintah untuk turun tangan mengatasinya.

Dalam suatu proses pembangunan menurut Musgrave, rasio investasi total terhadap pendapatan nasional semakin besar, tapi rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional akan mengecil. Sementara itu Rostow berpendapat bahwa pada tahap lanjut pembangunan, terjadi peralihan aktivitas pemerintah, dan penyediaan prasarana ekonomi kepengeluaran-pengeluaran untuk layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Rostow dan Musgrave, seperti halnya Wagner, melandasi pendapatannya juga berdasarkan pengamatan terhadap pengalaman pembangunan ekonomi di banyak negara.

E. Pandangan Keynes

Identitas keseimbangan pendapatan nasional $Y = C + I + G + X - M$ merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian (Dumairy 1996:161). Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijakan pengeluarannya, tetapi harus juga memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau yang terkena kebijakan tersebut.

Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai, melainkan harus juga diperhitungkan siapa yang akan terpekerjakan atau meningkat pendapatannya. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak justru melemahkan kegiatan pihak swasta.

Ahli ekonomi publik telah lama menaruh perhatian pada penyelidikan hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi semenjak mereka menyadari bahwa pengeluaran pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara baik pada negara berpendapatan rendah atau tinggi

2.2. TINJAUAN PUSTAKA

Tabel berikut ini menyajikan beberapa ringkasan penelitian terkait dengan studi yang akan dilakukan.

Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Judul, Nama Jurnal, Vol, No, Halaman	Tujuan Studi	Definisi Operasional Variabel	Hipotesis dan Hasil Studi serta Arah Hubungan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1.	Robert J. Barro, 1991, Economic Growth in a Cross Section of Countries , <i>The Quarterly Journal of Economics</i> , Vol. 106, No. 2. (May, 1991), pp. 407-443.	Untuk Mengetahui Apakah : 1. tingkat pertumbuhan per kapita suatu negara cenderung berbanding terbalik dengan level awal pendapatan. 2. Negara miskin cenderung tumbuh lebih cepat dari negara-negara kaya	<ul style="list-style-type: none"> ▶ GR6085 (GR7085): Growth rate of real per capita GDP from 1960 to 1985 (1970 to 1985). ▶ GDPGO (GDP70, GDP85): 1960 (1970, 1985) value of real percapita GDP (1980 base year). ▶ GDPGOSQ: Square of GDPGO. ▶ ily (ily, 70-85): Average from 1960 to 1985 (1970 to 1985) of the ratio of real domestic investment (private plus public) to real GDP. ▶ ip¹⁹⁷⁰/y: Average from 1970 to 1985 of the ratio of real private domestic investment to real GDP. ▶ gl/y: Average from 1970 to 1985 of the ratio of real public domestic investment to real GDP. ▶ g7i: Average from 1970 to 1985 of the ratio of real public domestic investment to real domestic investment (private plus public). ▶ gc/y: Average from 1970 to 1985 of the ratio of real government consumption (exclusive of defense and 	<p>Hipotesis bahwa negara-negara miskin cenderung tumbuh lebih cepat dari negara-negara kaya tampaknya tidak konsisten dengan bukti lintas negara, yang menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan per kapita memiliki korelasi kecil dengan tingkat awal produk per kapita</p> <p>Untuk Kasus 98 negara pada periode 1960-1985, tingkat pertumbuhan GDP riil per kapita berhubungan positif dengan modal awal manusia dan berhubungan negatif dengan tingkat per kapita riil PDB awal (1960). Negara-negara dengan sumber daya manusia yang lebih tinggi juga memiliki tingkat kesuburan yang lebih rendah dan lebih tinggi rasio investasi terhadap PDB fisik. Pertumbuhan berbanding terbalik dengan pangsa konsumsi pemerintah</p>

No	Peneliti, Tahun, Judul, Nama Jurnal, Vol, No. Halaman	Tujuan Studi	Definisi Operasional Variabel	Hipotesis dan Hasil Studi serta Arah Hubungan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
			<p>education) to real GDP.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ FERT: Total fertility rate (children per woman), average of 1965 and 1985. ▶ MORT04: Mortality rate for age 0 through 4, average of 1965 and 1985 ▶ MORT04: Mortality rate for age 0 through 4, average of 1965 and 1985. ▶ FERTNET: FERT x (1-MORT04). ▶ GPOP6085: Growth rate of population from 1960 to 1985. ▶ POP: Population in millions (geometric average of values from 1960 and 1985). ▶ SEC50 (SECGO, SEC85): 1950 (1960, 1985) secondary-school enrollment rate. ▶ PRIM50 (PRIMGO, PRIM85): 1950 (1960, 1985) primary-school enrollment rate. ▶ STTEAPRI (STTEASEC): Student-teacher ratio in primary (secondary) schools in 1960. ▶ LITGO: Adult literacy rate in 1960. ▶ REV: Number of revolutions and coups per year (1960-1985 or subsample). ▶ ASSASS: Number of assassinations per million population per year (1960-1985 or subsample). ▶ SOC: Dummy variable for socialist economic system. ▶ MIXED: Dummy variable for mixed free enterprise/socialistic economic system. ▶ PPPI60: 1960 PPP value for the investment 	<p>dalam PDB, namun tidak signifikan berhubungan dengan saham publik investasi. Tingkat pertumbuhan yang positif terkait dengan langkah-langkah stabilitas politik dan berbanding terbalik dengan proxy untuk distorsi pasar.</p>

No	Peneliti, Tahun, Judul, Nama Jurnal, Vol, No, Halaman	Tujuan Studi	Definisi Operasional Variabel	Hipotesis dan Hasil Studi serta Arah Hubungan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
			<p>deflator (U. S. = 1.0).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ PPIGODEV: Magnitude of the deviation of PPPIGO from the sample mean. ▶ PPPYGO: 1960 PPP value for the GDP deflator (U. S. = 1.0). ▶ AFRICA: Dummy variable for sub-Saharan Africa. ▶ LAT. AMER.: Dummy variable for Latin America. 	
2.	Paolo Mauro, 1995, Corruption and Growth , The Quarterly Journal of Economics, Vol. 110, No. 3 (Aug., 1995), pp. 681-712.	Untuk mengetahui pengaruh korupsi dan faktor-faktor kelembagaan lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi	The International Business Indeks Korupsi dan Efisiensi Kelembagaan Indeks proxy untuk korupsi dan berbagai variabel kelembagaan lainnya diambil dari Bisnis Internasional (BI), sekarang dimasukkan ke The Economist Intelligence Unit. BI adalah sebuah perusahaan swasta yang menjual indeks ini biasanya untuk bank, perusahaan multinasional, dan investor internasional lainnya. BI menerbitkan indeks pada 56 "country risk" faktor untuk 68 negara, untuk periode 1980-1983, dan pada 30 faktor risiko negara untuk 57 negara, untuk periode 1971-1979.	<p>Hipotesis</p> <p>Diduga korupsi memiliki hubungan negatif dengan investasi dan pertumbuhan ekonomi (I/GDP)</p> <p>Hasil</p> <p>Hasil temuan Korupsi dapat menurunkan investasi, sehingga menurunkan pertumbuhan ekonomi.</p>
3.	N. Gregory Mankiw, David Romer, David N. Weil, 1992, A Contribution to the Empirics of Economic Growth , The Quarterly Journal of Economics, Vol. 107, No. 2 (May, 1992), pp. 407-437	<ol style="list-style-type: none"> 1. Makalah ini membahas apakah model pertumbuhan Solow konsisten dengan variasi internasional dalam standar hidup. 2. Makalah ini juga membahas implikasi dari model Solow untuk konvergensi standar kehidupan, yaitu, untuk 	Data tahunan dan mencakup periode 1960-1985 dibangun oleh Summers dan Heston [1988]. Data yang dikumpulkan meliputi pendapatan riil, konsumsi pemerintah dan swasta, investasi, dan populasi hampir semua dunia selain ekonomi perencanaan pusat. Mereka mengukur n sebagai rata-rata pertumbuhan penduduk usia kerja, di mana usia kerja adalah didefinisikan sebagai 15 sampai 64.	<p>Hipotesis</p> <p>Diduga negara-negara miskin cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi lebih cepat dibandingkan negara kaya</p> <p>Hasil</p> <p>negara-negara miskin cenderung tumbuh lebih cepat dari negara-negara kaya</p>

No	Peneliti, Tahun, Judul, Nama Jurnal, Vol, No, Halaman	Tujuan Studi	Definisi Operasional Variabel	Hipotesis dan Hasil Studi serta Arah Hubungan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
		apakah negara-negara miskin cenderung tumbuh lebih cepat dari negara-negara kaya.	Mereka juga mengukur sebagai pangsa rata-rata investasi riil (termasuk investasi pemerintah) dalam GDP riil, dan Y / L sebagai nyata GDP 1985 dibagi dengan populasi - age bekerja di tahun itu.	
4	Suleiman A.S. Aruwa, 2012, Public finances and economic growth in Nigeria , Public and Municipal Finance, Volume 1, Issue 2, 2012, pp. 29-36	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji UU Wagner dan teori pendapatan belanja dari Friedman (1978) untuk kasus Nigeria 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Penelitian ini menggunakan data time series tahunan Pemerintah Federal Nigeria : ▶ pengeluaran (GOVEX), ▶ pendapatan (REV) dan ▶ Produk Domestik nyata Bruto (PDB) untuk periode sampel 1979-2008. 	<p>Hipotesis berikut: H1: Tidak ada hubungan kausal antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah di Nigeria. H2: Tidak ada hubungan kausal antara pendapatan pemerintah dan pengeluaran di Nigeria.</p> <p>Hasil : ada hubungan jangka panjang antara pengeluaran pemerintah dan PDRB, dan pengeluaran dan pendapatan publik untuk kasus Nigeria. Vector Error Correction Model menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB dan pendapatan menyebabkan pertumbuhan pengeluaran publik.</p>
5.	Kwabena Gyimah-Brempong, 2002, Corruption, economic growth, and income inequality in Africa , Econ. Gov. (2002) 3: 183–209	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tulisan ini meneliti efek dari korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan di negara-negara Afrika. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Korupsi berarti hal yang berbeda untuk orang yang berbeda tergantung pada disiplin individu, latar belakang budaya, dan bersandar politik. Dalam tulisan ini mendefinisikan korupsi sebagai penggunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. 	<p>Hipotesis : Diduga efek dari korupsi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan</p> <p>Hasil : <ul style="list-style-type: none"> ▶ korupsi mengurangi tingkat pertumbuhan pendapatan. Peningkatan satu unit indeks korupsi mengurangi tingkat pertumbuhan PDB antara 0,75 dan 0,9 poin persentase, dan pendapatan per kapita antara 0,39 dan 0,41 </p>

No	Peneliti, Tahun, Judul, Nama Jurnal, Vol, No, Halaman	Tujuan Studi	Definisi Operasional Variabel	Hipotesis dan Hasil Studi serta Arah Hubungan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
				<p>point persentase; efek relatif besar mengingat lambatnya pertumbuhan ekonomi di Afrika.</p> <p>► Korupsi menurunkan tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita secara langsung dengan menurunkan produktivitas sumber daya yang ada dan secara tidak langsung melalui pengurangan investasi.</p>
6.	<p>Kevin Sylwester, 2000, Income inequality, education expenditures, and growth, Journal of Development Economics Vol. 63 _2000. 379–398</p>	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah ketimpangan pendapatan dapat menurunkan pertumbuhan dengan meningkatkan belanja publik untuk pendidikan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ► y menunjukkan pendapatan per kapita, ► h menunjukkan sumber daya manusia, ► dem menunjukkan tingkat demokrasi, ► pop menunjukkan kepadatan penduduk, ► x dan z masing menunjukkan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan pengeluaran pendidikan atau pertumbuhan selain yang tercantum, ► dan ineq menunjukkan derajat ketidaksetaraan pendapatan 	<p>Hipotesis : Diduga ketimpangan pendapatan dapat menurunkan pertumbuhan dengan meningkatkan belanja publik untuk pendidikan.</p> <p>Hasil : artikel tidak membantu menjelaskan mengapa Peningkatan tingkat modal manusia tidak memiliki positif, pengaruh langsung terhadap pertumbuhan. Meskipun manfaat yang timbul dari persediaan modal manusia yang lebih tinggi, ada juga biaya yang terkait dengan peningkatan sumber daya manusia dan biaya-biaya ini dapat memberikan satu link mengapa ketimpangan pendapatan menurunkan pertumbuhan.</p>
7.	<p>David E. Bloom, David Canning, Linlin Hub, Yuanli Liu, Ajay Mahal, Winnie Yip, 2010, The contribution of population health and</p>	<p>Makalah ini menganalisis dan membandingkan percepatan pertumbuhan ekonomi di China dan India.</p>	<p>pendapatan riil per kapita, Data pada penduduk usia kerja (usia 15-64), jumlah penduduk, harapan hidup yang digunakan dalam regresi kami berasal dari Bank Dunia. Angka kematian, kesuburan, dan struktur umur di China dan</p>	<p>Hipotesis :</p> <p>Sebuah model yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi dg data panel selama periode 1960-2000 beberapa fitur kunci dari ledakan pertumbuhan</p>

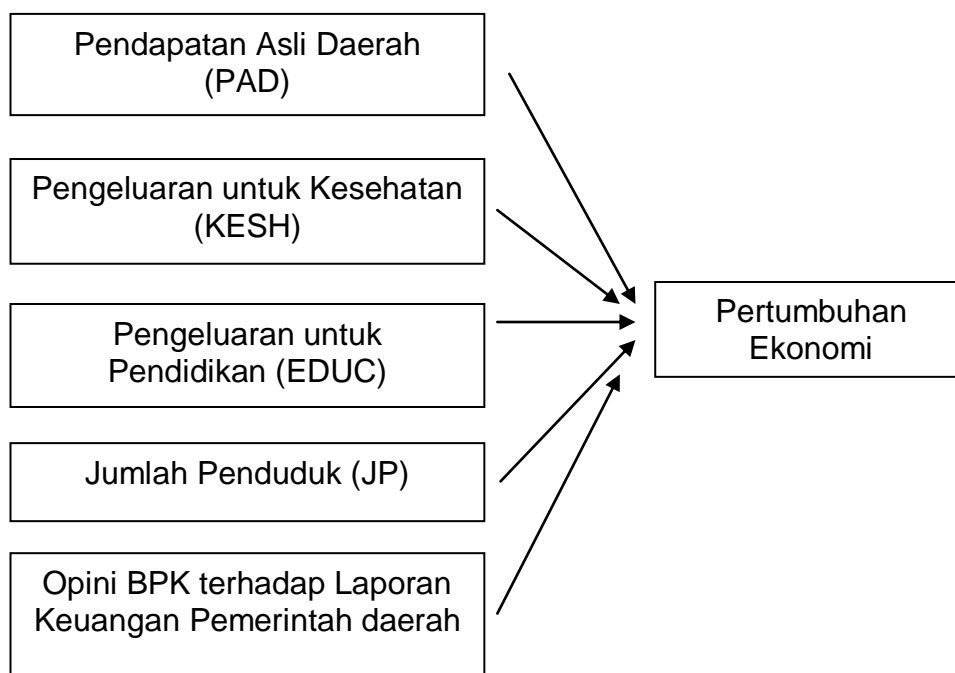
No	Peneliti, Tahun, Judul, Nama Jurnal, Vol, No, Halaman	Tujuan Studi	Definisi Operasional Variabel	Hipotesis dan Hasil Studi serta Arah Hubungan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
	<p>demographic change to economic growth in China and India, Journal of Comparative Economics 38 (2010) 17–33</p>		<p>India. Rasio pekerja untuk tanggungan Pendidikan diukur dengan total rata-rata tahun sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas, diambil dari Barro dan Lee (2000). Data pangsa tenaga kerja di sektor pertanian berasal dari Organisasi Pangan dan Pertanian (2005). Selain variabel-variabel ini, kami menyertakan faktor geografis dan kelembagaan yang dapat mempengaruhi produktivitas. Data persentase luas lahan di daerah tropis berasal dari Gallup et al. (1999). Knack dan Keefer (1995) melaporkan lima indikator mengukur kualitas kelembagaan, korupsi, penegakan hukum, kualitas birokrasi, risiko pengambilalihan, dan penolakan kontrak pemerintah.</p>	<p>ekonomi di China dan India sejak 1980. Alasan di balik ledakan pertumbuhan seperti yang ditunjukkan dalam model terutama kenaikan harapan hidup, kenaikan dalam perdagangan atau keterbukaan ekonomi, dan peningkatan andil anggota usia kerja di antara total penduduk. Dua temuan Pertama, model memberikan lebih cocok dari pengalaman pertumbuhan China dan India jika kita mengecualikan efek guncangan di seluruh dunia; Faktor domestik murni menjelaskan tingkat pertumbuhan mereka jauh lebih baik. Kedua, model gagal untuk menemukan efek positif pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi.</p>
8.	<p>Rock-Antoine Mehanna, The Temporal Causality Between Investment And Growth In Developing Economies, Journal Of Business And Economics Research Volume 1, Number 3, p. 85-91.</p>	<p>Penelitian ini menguji kausalitas temporal antara pertumbuhan ekonomi dan investasi.</p>	<p>G merupakan pertumbuhan ekonomi yang diwakili oleh tingkat pertumbuhan PDB riil per kapita; dan I adalah bagian investasi total PDB. Perdagangan keterbukaan adalah ukuran dari total perdagangan sebagai bagian dari PDB riil. Variabel Risiko menggunakan indeks risiko komposit ekonomi, keuangan dan politik sebagai wakilnya, yang dipinjam dari International Country Risk Guide (berbagai tahun).</p>	<p>Hipotesis : Tida Ada kausalitas temporal antara pertumbuhan ekonomi dan investasi. Temuan mengungkap hal berikut: (1) menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan merangsang investasi, yang pada gilirannya memacu pertumbuhan, (2) tingkat awal pendapatan per kapita tampaknya memiliki hubungan negatif dengan tingkat pertumbuhan per kapita, sehingga mendukung hipotesis konvergensi neoklasik teori pertumbuhan, dan (3) harapan hidup memiliki link positif yang</p>

No	Peneliti, Tahun, Judul, Nama Jurnal, Vol, No. Halaman	Tujuan Studi	Definisi Operasional Variabel	Hipotesis dan Hasil Studi serta Arah Hubungan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
				signifikan dengan pertumbuhan, yang konsisten dengan literatur pertumbuhan neoklasik.

Sumber: Berbagai artikel publikasi

2.3. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran digunakan sebagai pedoman atau sebagai gambaran alur pemikiran dalam fokus pada tujuan penelitian. Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apabila kita lihat pada kerangka pikir dibawah, dapat diketahui bahwasanya pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengeluaran untuk kesehatan (KESH), Pengeluaran untuk Pendidikan (EDUC), Jumlah penduduk (PENDDK) dan Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.



Gambar : Kerangka Pikir Penelitian

Secara grafis gambar diatas itu dapat digunakan sebagai gambaran dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan tersebut.

2.4. Hipotesis Penelitian

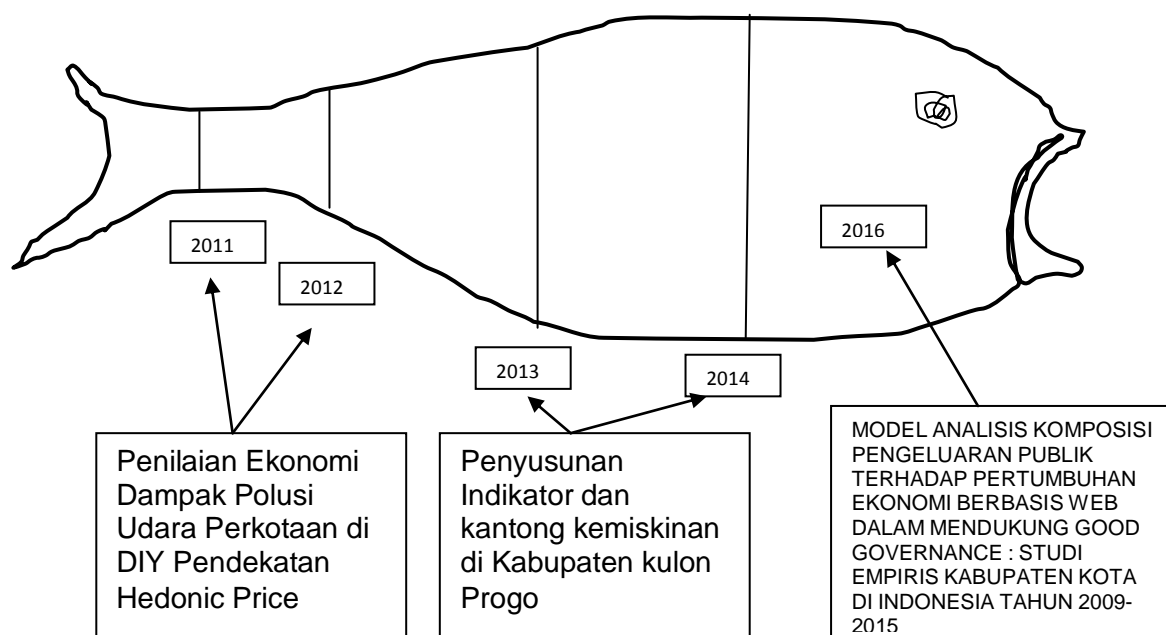
Dari kerangka teori dan penelitian terdahulu maka dapat kita turunkan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga ada hubungan positif antara Pendapatan Asli Daerah Untuk Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Diduga ada hubungan positif antara Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Diduga ada hubungan positif antara Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Diduga ada hubungan positif antara jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Diduga ada hubungan negatif antara Opini BPK terhadap LPKD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian bertujuan untuk mengkaji efektifitas pengeluaran pemerintah daerah terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga dapat menciptakan strategi pembangunan yang pro poor, pro job dan pro growth.

Penelitian ini direncanakan akan dibagi dalam dua tahapan dan setiap tahap diperlukan waktu selama satu tahun. Pada tahap pertama akan dilakukan pengujian peranan Pendapatan Asli Daerah, pengeluaran pemerintah daerah untuk anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, serta peranan penduduk dan opini BPK terhadap LKPD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia Bagian Barat (Jawa dan Sumatra) sehingga tercapai pro poor, pro job dan pro growth. Sedangkan pada tahap kedua, akan dianalisis ketimpangan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia bagian barat, Tengah dan timur dengan membandingkan efektifitas kualitas pengeluaran pendidikan dan kesehatan.

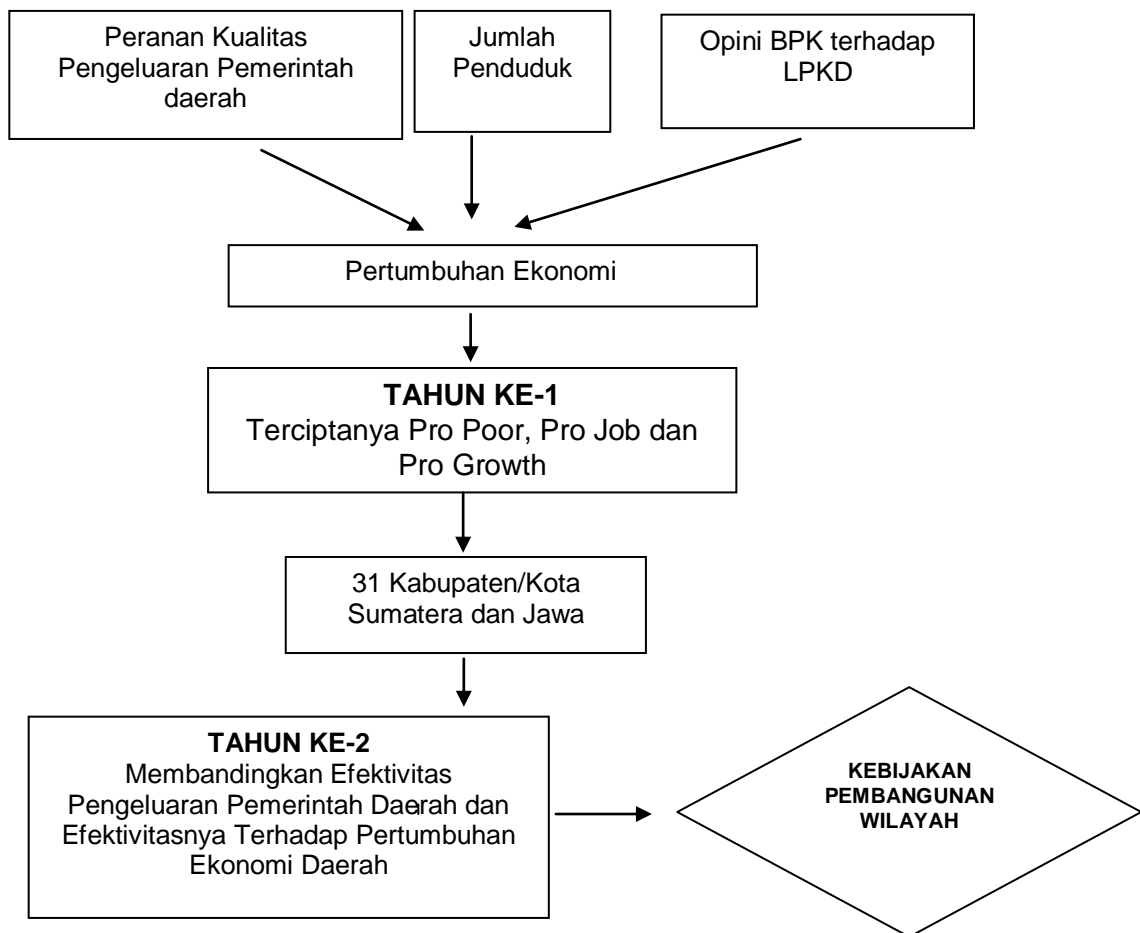


Gambar 3.1. fishbone diagram penelitian

Dari gambar 3,1 dapat kita lihat arah penelitian yang akan dikembangkan, didasarkan penelitian hibah bersaing yang pernah diperoleh peneliti pada tahun 2013 dan 2014, bahwa kemiskinan bersumber pada kurangnya kesempatan kerja serta sumber daya manusia yang rendah (minimnya anggaran kesehatan dan mahalnya pendidikan), kurangnya kesempatan kerja bersumber dari kurangnya investasi, dan kurangnya

investasi serta kurang tepatnya dalam memilih program pembangunan berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi. Sehingga dengan kajian **MODEL ANALISIS KOMPOSISI PENGELUARAN PUBLIK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS WEB DALAM Mendukung GOOD GOVERNANCE : STUDI EMPIRIS KABUPATEN KOTA DI INDONESIA TAHUN 2011-2014** dapat membantu menyelesaikan permasalahan klasik pembangunan ekonomi daerah.

Adapun kerangka kerja dalam penelitian ini ditunjukkan oleh Gambar 3.2



Gambar 3.2. Kerangka kerja penelitian

a. Jenis Data dan Sumber Data

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Variabel Terikat Pertumbuhan Ekonomi

- Variabel Bebas
1. Pendapatan Asli Daerah
 2. Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan
 3. Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan
 4. Jumlah Penduduk

5. Opini BPK terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Cara pengambilan data adalah dengan cara mengumpulkan data skunder di BPS, Bank Indonesia dan Departemen Keuangan berbagai terbitan dari tahun 2011 sampai 2014. Data skunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

b. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan data skunder

Variabel Terikat Pertumbuhan Ekonomi

Dicari di Biro Pusat Statistik dan Bank Indonesia dari berbagai terbitan

Variabel Bebas

1. Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari BPS daerah berbagai terbitan
2. Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan Diperoleh dari BPS dan Departemen Keuangan (berbagai terbitan)
3. Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan Diperoleh dari BPS dan Departemen Keuangan (berbagai terbitan)
4. Jumlah Penduduk Diperoleh dari BPS dan sensus penduduk kemudian digunakan pendekatan proyeksi
5. Opini BPK terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diperoleh dari laporan kementerian keuangan

c. Alat Analisis

Regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi dengan data panel. Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Menurut Agus Widarjono (2009) penggunaan data panel dalam sebuah observasi mempunyai beberapa keuntungan yang diperoleh. **Pertama**, data panel yang merupakan gabungan dua data *time series* dan *cross section* mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan lebih menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. **Kedua**, menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (*omitted-variabel*).

Hsiao (1986), mencatat bahwa penggunaan panel data dalam penelitian ekonomi memiliki beberapa keuntungan utama dibandingkan data jenis *cross section* maupun *time*

series. Pertama, dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan *degree of freedom* (derajat kebebasan), data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolinieritas antara variabel penjelas, di mana dapat menghasilkan estimasi ekonometri yang efisien. Kedua, panel data dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat diberikan hanya oleh data *cross section* atau *time series* saja. Dan Ketiga, panel data dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data *cross section*.

Menurut Wibisono (2005) keunggulan regresi data panel antara lain : **Pertama**. Panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu. **Kedua**. Kemampuan mengontrol heterogenitas ini selanjutnya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku lebih kompleks. **Ketiga**, data panel mendasarkan diri pada observasi *cross-section* yang berulang-ulang (*time series*), sehingga metode data panel cocok digunakan sebagai *study of dynamic adjustment*. **Keempat**, tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif, dan kolinieritas (*multikolinieritas*) antara data semakin berkurang, dan derajat kebebasan (*degree of freedom/df*) lebih tinggi sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien. **Kelima**, data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks. Dan **Keenam**, Data panel dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

Model Regresi Data Panel

Model Regresi Panel dari judul diatas sebagai berikut ini:

$$Y = \alpha + b_1X_{1it} + b_2X_{2it} + e$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen (LDR)

α = Konstanta

X1 = Variabel independen 1

X2 = Variabel independen 2

$b_{(1...2)}$ = Koefisien regresi masing-masing variabel independen

e = *Error term*

t = Waktu

i = Perusahaan

Metode Estimasi Model Regresi Panel

Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain:

1. *Common Effect Model*

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel.

2. *Fixed Effect Model*

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepanya. Untuk mengestimasi data panel model *Fixed Effects* menggunakan teknik *variable dummy* untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan, perbedaan intersep bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun demikian sloponya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variable* (LSDV).

3. *Random Effect Model*

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model *Random Effect* perbedaan intersep diakomodasi oleh *error terms* masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model *Random Effect* yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model* (ECM) atau teknik *Generalized Least Square* (GLS).

Pemilihan Model

Untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan yakni:

1. Uji Chow

Chow test yakni pengujian untuk menentukan model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.

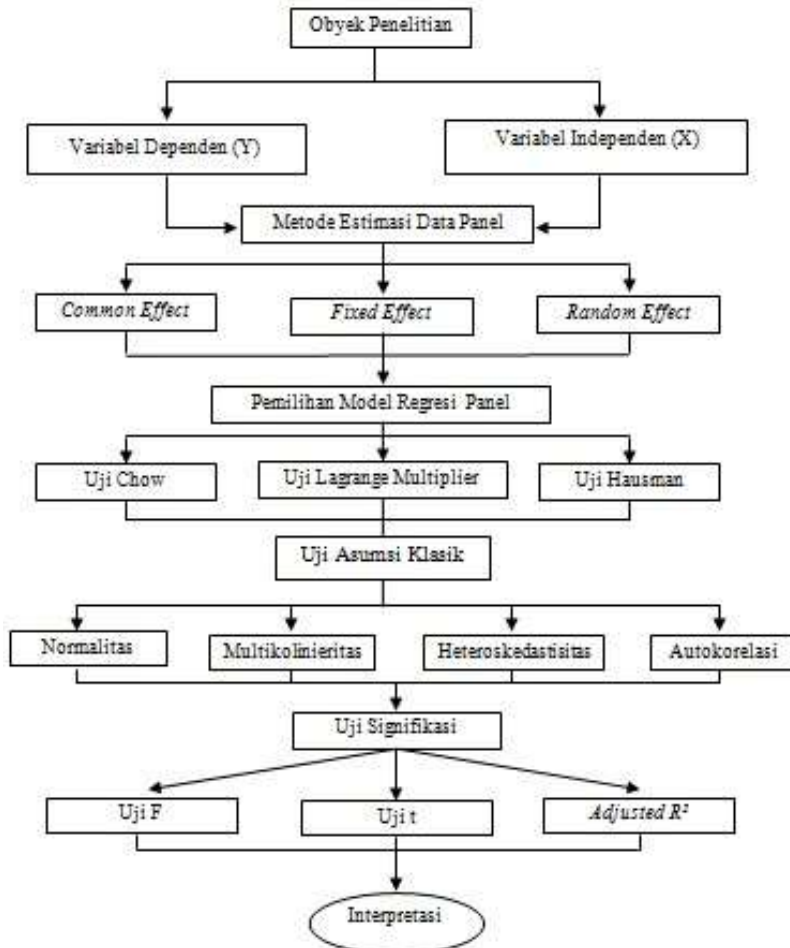
2. Uji Hausman

Hausman test adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan.

3. Uji Lagrange Multiplier

Untuk mengetahui apakah model *Random Effect* lebih baik daripada metode *Common Effect* (OLS) digunakan uji Lagrange Multiplier (LM).

Kerangka Pemikiran



Sumber : Gujarati, 2003

A. Common Effects Model

Model *common effects* merupakan pendekatan data panel yang paling sederhana. Model ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu sehingga diasumsikan bahwa perilaku antar individu sama dalam berbagai kurun waktu. Model ini hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* dalam bentuk *pool*, mengestimasiya menggunakan pendekatan kuadrat terkecil/*pooled least square*. Adapun persamaan regresi dalam model *common effects* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + X_{it}\beta + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

i = Aceh, Sumut,....., Papua

t = 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

dimana i menunjukkan *cross section* (individu) dan t menunjukkan periode waktunya. Dengan asumsi komponen *error* dalam pengolahan kuadrat terkecil biasa, proses estimasi secara terpisah untuk setiap unit *cross section* dapat dilakukan.

B. Fixed Effects Model

Model *Fixed effects* mengasumsikan bahwa terdapat efek yang berbeda antar individu. Perbedaan itu dapat diakomodasi melalui perbedaan pada intersepnya. Oleh karena itu, dalam model *fixed effects*, setiap merupakan parameter yang tidak diketahui dan akan diestimasi dengan menggunakan teknik variabel *dummy* yang dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + i\alpha_{it} + X'_{it}\beta + \varepsilon_{it}$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_1 \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ \alpha \\ \alpha \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} i & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_{11} & x_{21} & x_{p1} \\ x_{12} & x_{22} & x_{p2} \\ x_{1n} & x_{2n} & x_{pn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_n \end{bmatrix}$$

Teknik seperti diatas dinamakan *Least Square Dummy Variabel* (LSDV). Selain diterapkan untuk efek tiap individu, LSDV ini juga dapat mengakomodasi efek waktu yang bersifat sistemik. Hal ini dapat dilakukan melalui penambahan variabel *dummy* waktu di dalam model.

C. Random Effects Model

Berbeda dengan *fixed effects model*, efek spesifik dari masing-masing individu diperlakukan sebagai bagian dari komponen *error* yang bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel penjelas yang teramati, model seperti ini dinamakan *random effects model* (REM). Model ini sering disebut juga dengan *error component*

model (ECM). Dengan demikian, persamaan model *random effects* dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + X'_{it}\beta + w_{it}$$

$i = \text{Aceh, Sumut,....., Papua}$

$t = 2009, 2010, 2011, 2012, 2013$

Dimana :

$$w_{it} = \varepsilon_{it} + u_i ; E(w_{it}) = 0; E(w_{it}^2) = \alpha^2 + \alpha_u^2;$$

$$E(w_{it}, w_{jt-1}) = 0; i \neq j; E(u_i, \varepsilon_{it}) = 0;$$

$$E(\varepsilon_i, \varepsilon_{is}) = E(\varepsilon_{it}, \varepsilon_{jt}) = E(\varepsilon_{it}, \varepsilon_{js}) = 0$$

Meskipun komponen error w_t bersifat homoskedastik, nyatanya terdapat korelasi antara w_t dan w_{t-1} (equicorrelation), yakni :

$$\text{Corr}(w_{it}, w_{i(t-1)}) = \alpha_u^2 / (\alpha^2 + \alpha_u^2)$$

Karena itu, metode OLS tidak bisa digunakan untuk mendapatkan estimator yang efisien bagi model *random effects*. Metode yang tepat untuk mengestimasi model *random effects* adalah *Generalized Least Squares (GLS)* dengan asumsi homokedastik dan tidak ada *cross-sectional correlation*.

Judge (1980) dalam Fadly (2011), menyatakan ada perbedaan mendasar untuk menentukan pilihan antara FEM (*Fixed Effects Model*) dan ECM (*Error Component Model*) antara lain sebagai berikut (Gujarati, 2004):

1. Jika T (jumlah data *time series*) besar dan N (jumlah unit *cross-section*) kecil, perbedaan antara FEM dan ECM adalah sangat tipis. Oleh karena itu, dapat dilakukan penghitungan secara konvensional. Pada keadaan ini, FEM mungkin lebih disukai.
2. Ketika N besar dan T kecil, estimasi diperoleh dengan dua metode dapat berbeda secara signifikan. Pada ECM, dimana adalah komponen random *cross-section* dan pada FEM, ditetapkan dan tidak acak. Jika sangat yakin dan percaya bahwa individu, ataupun unit *cross-section* sampel adalah tidak acak, maka FEM lebih cocok digunakan. Jika unit *cross-section* sampel adalah random/acak, maka ECM lebih cocok digunakan.

3. Komponen *error* individu dan satu atau lebih regresor berkorelasi, estimator yang berasal dari ECM adalah bias, sedangkan yang berasal dari FEM adalah *unbiased*.
4. Jika N besar dan T kecil, serta jika asumsi untuk ECM terpenuhi, maka estimator ECM lebih efisien dibanding estimator FEM.

Keunggulan regresi data panel menurut Wibisono (2005) antara lain :

1. Panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu;
2. Kemampuan mengontrol heterogenitas ini selanjutnya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku lebih kompleks.
3. Data panel mendasarkan diri pada observasi cross-section yang berulang-ulang (time series), sehingga metode data panel cocok digunakan sebagai *study of dynamic adjustment*.
4. Tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informative, lebih variatif, dan kolinieritas (multikolinieritas) antara data semakin berkurang, dan derajat kebebasan (*degree of freedom/df*) lebih tinggi sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien.
5. Data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks.
6. Data panel dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

Secara formal, ada tiga prosedur pengujian yang akan digunakan, yaitu uji statistik F yang digunakan untuk memilih antara :

1. Model *common effects* atau *fixed effects*;
2. Uji *Lagrange Multiplier* (LM) yang digunakan untuk memilih antara model *common effects* atau model *random effects*;
3. Uji *Hausman* yang digunakan untuk memilih antara model *fixed effects* atau model *random effects*.

BAB IV ANALISIS DATA

4.1. Perkembangan PDRB

Pengertian domestik/regional disini dapat merupakan Propinsi atau Daerah Kabupaten/Kota. Transaksi Ekonomi yang akan dihitung adalah transaksi yang terjadi di wilayah domestik suatu daerah tanpa memperhatikan apakah transaksi dilakukan oleh masyarakat (residen) dari daerah tersebut atau masyarakat lain (non-residen).

Tabel

No	Uraian	PDRB				Rerata Pertumbuhan
		2011	2012	2013	2014	
1	Kab. Aceh Besar	2,618	2,736	2,860	2,980	3.46
2	Kab. Aceh Tenggara	789	832	874	917	4.06
3	Kab. Bireuen	2,775	2,930	3,067	3,216	3.97
4	Kab. Asahan	5,680	6,252	6,532	7,007	5.84
5	Kab. Dairi	2,159	2,276	2,400	2,519	4.17
6	Kab. Deli Serdang	15,389	16,322	18,410	19,728	7.05
7	Kab. Agam	3,280	3,503	3,726	3,949	5.10
8	Kab. Pasaman	1,453	1,542	1,637	1,728	4.73
9	Kota Padang	12,792	13,638	14,517	15,374	5.05
10	Kota Payakumbuh	931	994	1,061	1,125	5.21
11	Kota Sawahlunto	550	583	618	652	4.64
12	Kab. Bengkalis	30,398	29,894	28,038	27,083	-2.73
13	Kab. Kampar	9,730	10,247	10,723	11,226	3.84
14	Kab. Merangin	1,267	1,349	1,436	1,520	4.99
15	Kab. Tebo	971	1,037	1,104	1,170	5.12
16	Kab. Lahat	2,892	3,068	3,237	3,411	4.49
17	Kab. Musi Rawas	3,859	4,063	3,155	2,988	-5.64
18	Kab. Muara Enim	8,940	9,393	8,261	8,186	-2.11
19	Kab. Ogan Komering Ilir	3,544	3,777	4,021	4,258	5.04
20	Kab. Ogan Komering Ulu	3,012	3,232	3,435	3,649	5.29
21	Kab. Bengkulu Selatan	607	646	689	729	5.02
22	Kab. Bengkulu Utara	847	896	946	995	4.37
23	Kab. Kaur	259	273	289	304	4.34
24	Kab. Kepahiang	798	849	900	951	4.79
25	Kab. Lampung Tengah	6,587	7,007	7,436	7,859	4.83
26	Kab. Sukabumi	2,042	2,150	2,255	2,362	3.92
27	Kab. Brebes	5,781	6,082	6,390	6,693	3.94
28	Kab. Magelang	4,292	4,543	4,797	5,049	4.41
29	Kota Surakarta	5,412	5,743	6,081	6,414	4.63
30	Kab. Kulon Progo	1,869	1,963	2,062	2,158	3.87
31	Kab. Blitar	6,082	6,468	6,868	7,259	4.84

Sumber : BPS (berbagai terbitan)

4.2. Perkembangan PAD

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

a. Pajak Daerah

Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

b. Retribusi Daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

c. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Tabel

No	Uraian	PAD				Rerata Pertumbuhan
		2011	2012	2013	2014	
1	Kab. Aceh Besar	49,580	54,798	76,107	65,393	7.97
2	Kab. Aceh Tenggara	11,910	25,324	25,621	45,020	69.50
3	Kab. Bireuen	16,817	22,942	93,893	116,740	148.54
4	Kab. Asahan	31,844	37,895	53,692	59,130	21.42
5	Kab. Dairi	17,673	20,912	29,933	24,331	9.42
6	Kab. Deli Serdang	213,792	291,018	328,348	566,665	41.26
7	Kab. Agam	37,894	41,573	49,954	60,156	14.69
8	Kab. Pasaman	25,782	33,037	46,024	40,303	14.08
9	Kota Padang	149,875	189,451	238,872	315,065	27.55
10	Kota Payakumbuh	44,561	50,709	54,178	60,966	9.20
11	Kota Sawahlunto	36,382	34,888	37,105	43,672	5.01
12	Kab. Bengkalis	206,232	205,980	181,667	281,447	9.12
13	Kab. Kampar	96,909	110,077	157,869	120,637	6.12
14	Kab. Merangin	39,648	30,113	44,396	47,761	5.12
15	Kab. Tebo	19,538	26,939	34,331	35,179	20.01
16	Kab. Lahat	70,066	70,938	78,313	79,066	3.21
17	Kab. Musi Rawas	65,428	73,018	75,367	81,732	6.23
18	Kab. Muara Enim	86,937	119,456	125,111	133,627	13.43
19	Kab. Ogan Komering Ilir	47,387	54,618	68,701	62,449	7.95
20	Kab. Ogan Komering Ulu	42,120	41,429	44,680	68,959	15.93
21	Kab. Bengkulu Selatan	14,758	18,911	25,454	19,766	8.48
22	Kab. Bengkulu Utara	19,099	24,694	30,114	37,907	24.62
23	Kab. Kaur	6,811	7,782	10,339	12,659	21.47
24	Kab. Kepahiang	11,990	13,896	19,468	17,974	12.48
25	Kab. Lampung Tengah	50,569	101,060	81,780	109,937	29.35
26	Kab. Sukabumi	151,826	185,191	175,539	355,346	33.51
27	Kab. Brebes	78,276	101,807	133,836	153,414	24.00
28	Kab. Magelang	90,463	123,723	173,254	134,564	12.19
29	Kota Surakarta	181,097	231,672	298,401	297,027	16.00
30	Kab. Kulon Progo	53,752	74,029	95,992	92,815	18.17
31	Kab. Blitar	76,191	95,782	115,671	135,078	19.32

Sumber : Kementerian Keuangan

4.3. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu aspek penggunaan sumber daya ekonomi yang secara langsung dikuasai oleh pemerintah dan secara tidak langsung dimiliki oleh masyarakat melalui pembayaran pajak. Pada umumnya, pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan kegiatan perekonomian suatu negara. Keadaan ini dapat dijelaskan dalam kaidah yang dikenal sebagai Hukum Wagner, yaitu mengenai adanya korelasi positif antara pengeluaran pemerintah dengan tingkat pendapatan nasional. Walaupun demikian, peningkatan pengeluaran pemerintah yang besar belum tentu berakibat baik terhadap aktivitas perekonomian.

Tabel

No	Uraian	PENGELUARAN PEMDA BIDANG KESEHATAN				RERATA PERTUMBUHAN
		2011	2012	2013	2014	
1	Kab. Aceh Besar	76,645	88,564	103,974	128,282.11	16.84
2	Kab. Aceh Tenggara	49,352	61,578	80,620	109,796.72	30.62
3	Kab. Bireuen	68,262	87,755	161,966	184,149.18	42.44
4	Kab. Asahan	71,845	73,872	88,562	96,684.26	8.64
5	Kab. Dairi	53,226	66,312	100,272	87,999.96	16.33
6	Kab. Deli Serdang	157,851	189,578	222,363	345,784.60	29.76
7	Kab. Agam	85,700	77,002	89,959	115,316.43	8.64
8	Kab. Pasaman	19,767	63,481	86,504	106,494.06	109.69
9	Kota Padang	51,494	94,691	111,113	214,291.30	79.04
10	Kota Payakumbuh	56,558	61,768	69,071	77,253.61	9.15
11	Kota Sawahlunto	29,924	48,750	69,323	80,926.20	42.61
12	Kab. Bengkalis	77,279	214,016	260,552	308,547.69	74.82
13	Kab. Kampar	196,740	118,949	145,779	186,907.25	-1.25
14	Kab. Merangin	41,073	61,779	61,825	89,817.79	29.67
15	Kab. Tebo	156,129	45,981	60,355	64,622.09	-14.65
16	Kab. Lahat	78,180	109,854	124,004	141,346.64	20.20
17	Kab. Musi Rawas	41,556	108,720	135,888	110,520.17	41.49
18	Kab. Muara Enim	46,581	232,765	178,107	190,015.18	76.98
19	Kab. Ogan Komering Ilir	88,183	118,083	127,529	130,359.17	11.96
20	Kab. Ogan Komering Ulu	68,943	80,046	105,530	121,726.07	19.14
21	Kab. Bengkulu Selatan	45,585	69,174	74,456	78,136.20	17.85
22	Kab. Bengkulu Utara	23,196	66,836	96,263	96,408.84	78.91
23	Kab. Kaur	70,959	34,071	35,995	47,516.74	-8.26
24	Kab. Kepahiang	85,484	37,983	51,699	58,902.13	-7.77
25	Kab. Lampung Tengah	88,101	11,197	100,759	124,001.70	10.19
26	Kab. Sukabumi	59,187	291,562	277,299	392,163.38	140.65
27	Kab. Brebes	110,835	152,288	206,765	231,707.89	27.26

No	Uraian	PENGELUARAN PEMDA BIDANG KESEHATAN				RERATA PERTUMBUHAN
		2011	2012	2013	2014	
28	Kab. Magelang	113,140	111,523	142,334	152,856.26	8.78
29	Kota Surakarta	90,301	98,489	121,791	124,125.75	9.36
30	Kab. Kulon Progo	85,362	109,131	117,911	132,999.59	13.95
31	Kab. Blitar	154,304	78,795	86,255	89,115.94	-10.56

Sumber : Kementerian Keuangan

4.4. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting dalam proses pembangunan sebuah daerah. Majunya pendidikan akan berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan produktivitas berdampak pada efisiensi biaya produksi, dan hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Tabel

No	Uraian	PENGELUARAN PEMDA BIDANG PENDIDIKAN				Rerata Pertumbuhan
		2011	2012	2013	2014	
1	Kab. Aceh Besar	276,749	322,021	373,068	448,245.95	15.49
2	Kab. Aceh Tenggara	176,435	191,832	231,869	267,023.84	12.84
3	Kab. Bireuen	350,115	391,674	426,641	490,880.64	10.05
4	Kab. Asahan	405,514	388,755	461,563	483,583.45	4.81
5	Kab. Dairi	256,231	263,658	320,269	310,431.06	5.29
6	Kab. Deli Serdang	789,927	876,546	1,053,278	1,225,111.35	13.77
7	Kab. Agam	207,100	487,477	563,833	591,054.83	46.35
8	Kab. Pasaman	147,319	267,390	217,514	256,080.15	18.46
9	Kota Padang	251,145	701,660	749,009	965,407.07	71.10
10	Kota Payakumbuh	181,933	173,898	204,957	220,579.04	5.31
11	Kota Sawahlunto	117,740	115,115	114,067	148,673.75	6.57
12	Kab. Bengkalis	226,454	831,600	956,801	979,684.81	83.15
13	Kab. Kampar	173,464	690,912	792,469	890,716.15	103.37
14	Kab. Merangin	226,476	273,897	369,718	364,392.10	15.22
15	Kab. Tebo	482,977	236,053	240,380	281,925.23	-10.41
16	Kab. Lahat	241,333	394,859	446,440	527,714.19	29.67
17	Kab. Musi Rawas	115,498	316,514	379,423	246,521.02	28.36
18	Kab. Muara Enim	190,462	516,157	560,861	558,881.45	48.36
19	Kab. Ogan Komering Ilir	369,796	453,955	517,621	552,619.32	12.36
20	Kab. Ogan Komering Ulu	368,118	250,927	331,631	339,411.90	-1.95
21	Kab. Bengkulu Selatan	123,729	224,675	248,919	297,079.90	35.03
22	Kab. Bengkulu Utara	96,748	235,612	239,563	289,127.88	49.71
23	Kab. Kaur	262,931	126,979	135,315	152,499.86	-10.50

No	Uraian	PENGELUARAN PEMDA BIDANG PENDIDIKAN				Rerata Pertumbuhan
		2011	2012	2013	2014	
24	Kab. Kepahiang	547,745	130,889	161,454	167,883.31	-17.34
25	Kab. Lampung Tengah	555,839	784,643	820,503	969,277.66	18.60
26	Kab. Sukabumi	390,192	916,725	786,374	795,358.30	25.96
27	Kab. Brebes	686,796	730,893	930,998	913,057.20	8.24
28	Kab. Magelang	550,834	207,639	863,392	953,023.66	18.25
29	Kota Surakarta	402,045	514,297	546,251	651,021.10	15.48
30	Kab. Kulon Progo	618,701	448,020	461,433	498,901.00	-4.84
31	Kab. Blitar	714,505	188,249	222,894	243,247.17	-16.49

Sumber : Kementerian Keuangan

4.5. Perkembangan Jumlah Penduduk

Perkembangan penduduk suatu wilayah akan berdampak pada aktivitas kegiatan ekonomi suatu daerah. Jika peningkatan penduduk dibarengi dengan peningkatan sumberdaya manusia yang handal maka akan berdampak pada peningkatan efisiensi biaya produksi, tetapi sebaliknya jika pertambahan penduduk tidak dibarengi dengan peningkatan sumberdaya manusia, maka akan menimbulkan masalah sosial yaitu peningkatan pengangguran dan peningkatan pengangguran berdampak pada peningkatan kemiskinan dan kemiskinan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Tabel

No	Uraian	JUMLAH PENDUDUK				RERATA PERTUMBUHAN
		2011	2012	2013	2014	
1	Kab. Aceh Besar	359,044	366,441	373,989	381,694	1.58
2	Kab. Aceh Tenggara	182,895	186,662	190,508	194,432	1.58
3	Kab. Bireuen	397,736	405,930	414,292	422,826	1.58
4	Kab. Asahan	677,892	687,315	696,868	706,555	1.06
5	Kab. Dairi	273,941	277,748	281,609	285,523	1.06
6	Kab. Deli Serdang	1,816,205	1,841,450	1,867,046	1,892,998	1.06
7	Kab. Agam	461,157	467,337	473,599	479,945	1.02
8	Kab. Pasaman	256,810	260,251	263,738	267,272	1.02
9	Kota Padang	845,115	856,440	867,916	879,546	1.02
10	Kota Payakumbuh	118,444	120,031	121,640	123,270	1.02
11	Kota Sawahlunto	57,654	58,427	59,210	60,003	1.02
12	Kab. Bengkalis	512,404	525,931	539,816	554,067	2.03
13	Kab. Kampar	707,632	726,313	745,488	765,169	2.03
14	Kab. Merangin	339,665	345,949	352,349	358,868	1.41
15	Kab. Tebo	303,507	309,122	314,840	320,665	1.41
16	Kab. Lahat	375,738	381,374	387,094	392,901	1.14

No	Uraian	JUMLAH PENDUDUK				RERATA PERTUMBUHAN
		2011	2012	2013	2014	
17	Kab. Musi Rawas	533,694	541,700	549,825	558,073	1.14
18	Kab. Muara Enim	727,840	738,758	749,839	761,087	1.14
19	Kab. Ogan Komering Ilir	738,707	749,788	761,035	772,450	1.14
20	Kab. Ogan Komering Ulu	329,093	334,029	339,040	344,125	1.14
21	Kab. Bengkulu Selatan	145,518	148,051	150,627	153,247	1.33
22	Kab. Bengkulu Utara	262,360	266,925	271,569	276,295	1.33
23	Kab. Kaur	109,861	111,772	113,717	115,696	1.33
24	Kab. Kepahiang	127,135	129,347	131,598	133,888	1.33
25	Kab. Lampung Tengah	1,185,943	1,200,886	1,216,018	1,231,339	0.96
26	Kab. Sukabumi	303,592	308,389	313,261	318,211	1.20
27	Kab. Brebes	1,748,383	1,762,719	1,777,174	1,791,746	0.62
28	Kab. Magelang	1,191,615	1,201,386	1,211,237	1,221,170	0.62
29	Kota Surakarta	503,517	507,646	511,808	516,005	0.62
30	Kab. Kulon Progo	393,679	398,403	403,183	408,022	0.91
31	Kab. Blitar	132,894	133,811	134,735	135,664	0.52

4.6. Perkembangan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah daerah

Menurut amanat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Menurut ketentuan tersebut, BPK wajib menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan serta presiden, gubernur, bupati, dan wali kota selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya masa semester bersangkutan.

Tabel
Opini BPK terhadap LKPD

No	Uraian	OPINI			
		2011	2012	2013	2014
1	Kab. Aceh Besar	WDP	WTP	WTP	WTP
2	Kab. Aceh Tenggara	WDP	WDP	WDP	WDP
3	Kab. Bireuen	WDP	WDP	WDP	WTP
4	Kab. Asahan	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP
5	Kab. Dairi	WDP	WDP	WDP	WTP
6	Kab. Deli Serdang	TMP	TW	TMP	WDP
7	Kab. Agam	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
8	Kab. Pasaman	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
9	Kota Padang	WDP	WTP-DPP	WDP	WTP-DPP
10	Kota Payakumbuh	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP
11	Kota Sawahlunto	WDP	WDP	WDP	WDP
12	Kab. Bengkalis	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
13	Kab. Kampar	WDP	WDP	WDP	WDP
14	Kab. Merangin	WDP	WDP	WDP	WDP

No	Uraian	OPINI			
		2011	2012	2013	2014
15	Kab. Tebo	WDP	WDP	WDP	WDP
16	Kab. Lahat	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP
17	Kab. Musi Rawas	WDP	WDP	WDP	WTP
18	Kab. Muara Enim	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP
19	Kab. Ogan Komering Ilir	WTP	WTP	WTP	WTP
20	Kab. Ogan Komering Ulu	WDP	WDP	WDP	WDP
21	Kab. Bengkulu Selatan	WDP	WDP	WDP	WTP
22	Kab. Bengkulu Utara	WDP	WTP	WTP	WTP
23	Kab. Kaur	WTP	WTP	WTP	WTP
24	Kab. Kepahiang	WDP	TMP	WDP	WDP
25	Kab. Lampung Tengah	WDP	WTP	WDP	WDP
26	Kab. Sukabumi	WDP	WDP	WDP	WDP
27	Kab. Brebes	WDP	WDP	WDP	WDP
28	Kab. Magelang	WDP	WDP	WDP	WDP
29	Kota Surakarta	WTP	WTP	WTP	WTP
30	Kab. Kulon Progo	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
31	Kab. Blitar	WDP	WDP	WDP	WDP

4.7. Hasil Analisis dan Pembahasan

1. Uji Kualitas Data

Berikut ini output hasil Uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji Park yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

TABEL 4
Uji Heterokedastisitas dengan Uji Park

Variabel	Prob.
C	0.3731
LOG(PAD?)	0.9690
LOG(KESH?)	0.5807
LOG(EDUC?)	0.3566
LOG(PENDDK?)	0.9946
OPINI?	0.0252

Sumber : Data diolah

Keterangan :

*** = signifikan 1% ** = signifikan 5% * = signifikan 10%

Dari tabel 4, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan sebagai variabel independen terbebas dari masalah heterokedastisitas.

Uji Multikolinearitas adalah keadaan dimana antara variabel-variabel bebas dalam model regresi berganda ditemukan adanya korelasi (hubungan) antara satu dengan yang lain. Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi

ini ditemukan adanya korelasi tersebut. Apabila terjadi multikolinearitas, maka koefisien regresi dari variabel bebas akan tidak signifikan dan mempunyai *standard error* yang tinggi. Semakin kecil korelasi antar variabel bebas, maka model regresi akan semakin baik (Santoso, 2005).

Dari lampiran dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasinya antar variabel independen tidak lebih besar dari [0,9] dengan demikian data dalam penelitian ini tidak terjadi masalah multikolinearitas.

2. Analisis Model Terbaik

Dalam analisa model data panel terdapat tiga macam pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan kuadrat terkecil (*ordinary/pooled least square*), pendekatan efek tetap (*fixed effect*), dan pendekatan efek acak (*random effect*). Pengujian statistik untuk memilih model pertama kali adalah dengan melakukan uji Chow untuk menentukan apakah metode *Pooled least square* atau *Fixed effect* yang sebaiknya digunakan dalam membuat regresi data panel.

Pemilihan model ini menggunakan uji analisis terbaik selengkapya dijelaskan dalam tabel berikut.

TABEL 6

Hasil Estimasi Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran Kesehatan, Pengeluaran Pendidikan, Jumlah Penduduk dan Opini BPK terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa dan sumatra

Variabel Dependen : Pertumbuhan Ekonomi (LOG(PDRB))	Model		
	Common Effect	Fixed Effect	Random Effect
Konstanta	-6.07371	-26.3703	-6.18071
Standar error	1.049039	2.03595	1.436591
Probabilitas	0.000	0.00	0.00
LOG(PAD)	0.626191	0.055386	0.134391
Standar error	0.077517	0.013214	0.021281
Probabilitas	0.000	0.00	0.00
LOG(KESH)	-0.03303	0.007851	0.006934
Standar error	0.124984	0.005073	0.016264
Probabilitas	0.792	0.13	0.67
LOG(EDUC)	0.078158	-0.00647	0.001521
Standar error	0.142827	0.007484	0.018637
Probabilitas	0.585	0.39	0.94
LOG(PENDDK)	0.539554	2.623983	0.982667
Standar error	0.087343	0.167768	0.117329
Probabilitas	0.000	0.00	0.00
Dummy	-0.12023	-0.00893	-0.01856
Standar error	0.049481	0.004154	0.009077
Probabilitas	0.017	0.03	0.04
R²	0.784428	0.999863	0.578168

Variabel Dependen : Pertumbuhan Ekonomi (LOG(PDRB))	Model		
	Common Effect	Fixed Effect	Random Effect
F _{statistik}	85.87597	18384.13	32.34642
Probabilitas	0.000000	0.000000	0.000000

Sumber: Data diolah

Keterangan : *** = signifikan 1% ** = signifikan 5% * = signifikan 10%

Berdasarkan uji spesifikasi model yang telah dilakukan dari kedua analisis yang dilakukan yaitu dengan menggunakan *Uji Likelihood* dan *Hausman Test* keduanya menyarankan untuk menggunakan *Fixed Effect*, dan dari perbandingan uji pemilihan terbaik maka model regresi yang digunakan dalam mengestimasi Pengaruh Jumlah Unit Usaha, Nilai Investasi, Nilai Produksi dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Kecil kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah *Fixed Effect Model*. Dipilihnya *Fixed Effect Model* karena memiliki probabilitas masing-masing variabel independen dari *Fixed Effect Model* lebih signifikan dibanding *Random Effect Model* atau *Common Effect Model* yang masing-masing variabel independennya tidak signifikan sehingga model yang lebih baik yaitu *Fixed Effect Model*.

Pemilihan metode pengujian data panel dilakukan pada seluruh data sample, uji Chow dilakukan untuk memilih metode pengujian data panel antara metode *Pooled least square* atau *Fixed Effect*. Jika nilai F statistik pada uji Chow signifikan, maka uji Hausman akan dilakukan untuk memilih antara metode *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Hasil uji Hausman dengan nilai probabilitas yang kurang dari Alpha adalah signifikan, artinya metode *Fixed Effect* yang dipilih untuk mengolah data panel. Pemilihan metode pengujian dilakukan dengan menggunakan pilihan *Fixed Effect* dan *Random Effect* serta mengkombinasikan, baik *cross-section*, *period*, maupun gabungan *cross-section/period*.

3. Pemilihan Metode Pengujian Data Panel

a. Uji Chow (Uji likelihood)

Uji Chow merupakan uji untuk menentukan model terbaik antara *Fixed Effect Model* dengan *Common/Pool Effect Model*. Jika hasilnya menyatakan menerima hipotesis nol maka model yang terbaik untuk digunakan adalah *Common Effect Model*. Akan tetapi, jika hasilnya menyatakan menolak hipotesis nol maka model terbaik yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*, dan pengujian akan berlanjut ke uji Hausman.

Berdasarkan tabel Uji Chow diatas, kedua nilai probabilitas *Cross Section F* dan *Chi Square* yang lebih kecil dari Alpha 0,05 sehingga menolak hipotesis nol. Jadi

menurut Uji Chow, model yang terbaik digunakan adalah model dengan menggunakan metode *Fixed effect*. Berdasarkan hasil Uji Chow yang menolak hipotesis nol, maka pengujian data berlanjut ke Uji Hausman.

b. Uji Hausman

Uji Hausman merupakan pengujian untuk menentukan penggunaan metode antara *Random Effect* dengan *Fixed Effect*. Jika dari hasil Uji Hausman tersebut menyatakan menerima hipotesis nol maka model yang terbaik untuk digunakan adalah model *Random Effect*. Akan tetapi, jika hasilnya menyatakan menolak hipotesis nol maka model terbaik yang digunakan adalah model *Fixed Effect*.

Berdasarkan tabel Uji Hausman, nilai probabilitas *Cross-section random* adalah 0,0000 yang lebih kecil dari Alpha 0,05 sehingga menolak hipotesis nol. Jadi menurut uji hausman, model yang terbaik digunakan adalah model dengan menggunakan metode *Fixed Effect*.

c. Hasil Estimasi Model Data Panel Fixed Effect Model (FEM)

Berdasarkan uji spesifikasi model yang telah dilakukan serta dari perbandingan nilai terbaik maka model regresi yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*. *Fixed Effect Model* (FEM) adalah teknik estimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk mengetahui adanya perbedaan *intercept* antar *cross section*. Berikut tabel yang menunjukkan hasil estimasi data dengan jumlah observasi sebanyak 31 kabupaten/kota selama periode 2011-2014 (4 tahun).

TABEL 9
Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Variabel Dependen : Pertumbuhan Ekonomi (LOG(PDRB))	Model
	Fixed Effect
Konstanta	-26.3703
Standar error	2.03595
Probabilitas	0.00
LOG(PAD)	0.055386
Standar error	0.013214
Probabilitas	0.00
LOG(KESH)	0.007851
Standar error	0.005073
Probabilitas	0.13
LOG(EDUC)	-0.00647
Standar error	0.007484
Probabilitas	0.39

Variabel Dependen : Pertumbuhan Ekonomi (LOG(PDRB))	Model
	Fixed Effect
LOG(PENDDK)	2.623983
Standar error	0.167768
Probabilitas	0.00
Dummy	-0.00893
Standar error	0.004154
Probabilitas	0.03
R ²	0.999863
F _{statistik}	18384.13
Probabilitas	0.000000

Sumber: Hasil Pengolahan data panel

Dari hasil estimasi diatas, maka dapat dibuat model analisis data panel terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada industri kecil disetiap kabupaten dan kota di Jawa dan sumatra yang di interpretasikan sebagai berikut:

$$\text{LOG (PDRB)} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{LOG(PAD)} + \beta_2 \cdot \text{LOG(KESH)} + \beta_3 \cdot \text{LOG(EDUC)} + \beta_4 \cdot \text{LOG(PENDDK)} + \beta_4 \cdot \text{OPINI} + et$$

Keterangan:

LOG(PDRB)	= Pertumbuhan Ekonomi
LOG(PAD)	= Pendapatan Asli Daerah
LOG(KESH)	= Belanja PEMDA untuk Kesehatan
LOG(EDUC)	= Belanja PEMDA untuk pendidikan
LOG(PRENDDK)	= Jumlah Penduduk
OPINI	= Dummy Variabel
β_0	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_4$	= Koefisien Parameter
et	= Disturbance Error

Dimana diperoleh hasil regresi sebagai berikut :

Estimation Command:

```
=====
LS(CX=F) LOG(PDRB?) C LOG(PAD?) LOG(KESH?) LOG(EDUC?) LOG(PENDDK?) OPINI?
```

Estimation Equations:

```
=====
LOG(PDRB_KABACEHBES) = C(7) + C(1) + C(2)*LOG(PAD_KABACEHBES) +
C(3)*LOG(KESH_KABACEHBES) + C(4)*LOG(EDUC_KABACEHBES) +
C(5)*LOG(PENDDK_KABACEHBES) + C(6)*OPINI_KABACEHBES
```

```
LOG(PDRB_KABACEHTENG) = C(8) + C(1) + C(2)*LOG(PAD_KABACEHTENG) +
C(3)*LOG(KESH_KABACEHTENG) + C(4)*LOG(EDUC_KABACEHTENG) +
C(5)*LOG(PENDDK_KABACEHTENG) + C(6)*OPINI_KABACEHTENG
```


$$\begin{aligned} \text{LOG(PDRB_KABBIREUEN)} &= C(9) + C(1) + C(2)*\text{LOG(PAD_KABBIREUEN)} + \\ &C(3)*\text{LOG(KESH_KABBIREUEN)} + C(4)*\text{LOG(EDUC_KABBIREUEN)} + \\ &C(5)*\text{LOG(PENDDK_KABBIREUEN)} + C(6)*\text{OPINI_KABBIREUEN} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(PDRB_KABASAHAN)} &= C(10) + C(1) + C(2)*\text{LOG(PAD_KABASAHAN)} + \\ &C(3)*\text{LOG(KESH_KABASAHAN)} + C(4)*\text{LOG(EDUC_KABASAHAN)} + \\ &C(5)*\text{LOG(PENDDK_KABASAHAN)} + C(6)*\text{OPINI_KABASAHAN} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(PDRB_KABDAIRI)} &= C(11) + C(1) + C(2)*\text{LOG(PAD_KABDAIRI)} + C(3)*\text{LOG(KESH_KABDAIRI)} + \\ &C(4)*\text{LOG(EDUC_KABDAIRI)} + C(5)*\text{LOG(PENDDK_KABDAIRI)} + C(6)*\text{OPINI_KABDAIRI} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(PDRB_KABDELISERDANG)} &= C(12) + C(1) + C(2)*\text{LOG(PAD_KABDELISERDANG)} + \\ &C(3)*\text{LOG(KESH_KABDELISERDANG)} + C(4)*\text{LOG(EDUC_KABDELISERDANG)} + \\ &C(5)*\text{LOG(PENDDK_KABDELISERDANG)} + C(6)*\text{OPINI_KABDELISERDANG} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(PDRB_KABAGAM)} &= C(13) + C(1) + C(2)*\text{LOG(PAD_KABAGAM)} + C(3)*\text{LOG(KESH_KABAGAM)} + \\ &C(4)*\text{LOG(EDUC_KABAGAM)} + C(5)*\text{LOG(PENDDK_KABAGAM)} + C(6)*\text{OPINI_KABAGAM} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(PDRB_KABPASAMAN)} &= C(14) + C(1) + C(2)*\text{LOG(PAD_KABPASAMAN)} + \\ &C(3)*\text{LOG(KESH_KABPASAMAN)} + C(4)*\text{LOG(EDUC_KABPASAMAN)} + \\ &C(5)*\text{LOG(PENDDK_KABPASAMAN)} + C(6)*\text{OPINI_KABPASAMAN} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(PDRB_KOTAPADANG)} &= C(15) + C(1) + C(2)*\text{LOG(PAD_KOTAPADANG)} + \\ &C(3)*\text{LOG(KESH_KOTAPADANG)} + C(4)*\text{LOG(EDUC_KOTAPADANG)} + \\ &C(5)*\text{LOG(PENDDK_KOTAPADANG)} + C(6)*\text{OPINI_KOTAPADANG} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(PDRB_KOTAPAYAKUMBUH)} &= C(16) + C(1) + C(2)*\text{LOG(PAD_KOTAPAYAKUMBUH)} + \\ &C(3)*\text{LOG(KESH_KOTAPAYAKUMBUH)} + C(4)*\text{LOG(EDUC_KOTAPAYAKUMBUH)} + \\ &C(5)*\text{LOG(PENDDK_KOTAPAYAKUMBUH)} + C(6)*\text{OPINI_KOTAPAYAKUMBUH} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(PDRB_KOTASAWAHLUNTO)} &= C(17) + C(1) + C(2)*\text{LOG(PAD_KOTASAWAHLUNTO)} + \\ &C(3)*\text{LOG(KESH_KOTASAWAHLUNTO)} + C(4)*\text{LOG(EDUC_KOTASAWAHLUNTO)} + \\ &C(5)*\text{LOG(PENDDK_KOTASAWAHLUNTO)} + C(6)*\text{OPINI_KOTASAWAHLUNTO} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(PDRB_KABBENGGALIS)} &= C(18) + C(1) + C(2)*\text{LOG(PAD_KABBENGGALIS)} + \\ &C(3)*\text{LOG(KESH_KABBENGGALIS)} + C(4)*\text{LOG(EDUC_KABBENGGALIS)} + \\ &C(5)*\text{LOG(PENDDK_KABBENGGALIS)} + C(6)*\text{OPINI_KABBENGGALIS} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(PDRB_KABKAMPAR)} &= C(19) + C(1) + C(2)*\text{LOG(PAD_KABKAMPAR)} + \\ &C(3)*\text{LOG(KESH_KABKAMPAR)} + C(4)*\text{LOG(EDUC_KABKAMPAR)} + \\ &C(5)*\text{LOG(PENDDK_KABKAMPAR)} + C(6)*\text{OPINI_KABKAMPAR} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(PDRB_KABMERANGIN)} &= C(20) + C(1) + C(2)*\text{LOG(PAD_KABMERANGIN)} + \\ &C(3)*\text{LOG(KESH_KABMERANGIN)} + C(4)*\text{LOG(EDUC_KABMERANGIN)} + \\ &C(5)*\text{LOG(PENDDK_KABMERANGIN)} + C(6)*\text{OPINI_KABMERANGIN} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(PDRB_KABTEBO)} &= C(21) + C(1) + C(2)*\text{LOG(PAD_KABTEBO)} + C(3)*\text{LOG(KESH_KABTEBO)} + \\ &C(4)*\text{LOG(EDUC_KABTEBO)} + C(5)*\text{LOG(PENDDK_KABTEBO)} + C(6)*\text{OPINI_KABTEBO} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(PDRB_KABLAHAT)} &= C(22) + C(1) + C(2)*\text{LOG(PAD_KABLAHAT)} + \\ &C(3)*\text{LOG(KESH_KABLAHAT)} + C(4)*\text{LOG(EDUC_KABLAHAT)} + C(5)*\text{LOG(PENDDK_KABLAHAT)} + \\ &C(6)*\text{OPINI_KABLAHAT} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(PDRB_KABMUSIRAWAS)} &= C(23) + C(1) + C(2)*\text{LOG(PAD_KABMUSIRAWAS)} + \\ &C(3)*\text{LOG(KESH_KABMUSIRAWAS)} + C(4)*\text{LOG(EDUC_KABMUSIRAWAS)} + \\ &C(5)*\text{LOG(PENDDK_KABMUSIRAWAS)} + C(6)*\text{OPINI_KABMUSIRAWAS} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(PDRB_KABMUARAENIM)} &= C(24) + C(1) + C(2)*\text{LOG(PAD_KABMUARAENIM)} + \\ &C(3)*\text{LOG(KESH_KABMUARAENIM)} + C(4)*\text{LOG(EDUC_KABMUARAENIM)} + \\ &C(5)*\text{LOG(PENDDK_KABMUARAENIM)} + C(6)*\text{OPINI_KABMUARAENIM} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(PDRB_KABOKI)} &= C(25) + C(1) + C(2)*\text{LOG(PAD_KABOKI)} + C(3)*\text{LOG(KESH_KABOKI)} + \\ &C(4)*\text{LOG(EDUC_KABOKI)} + C(5)*\text{LOG(PENDDK_KABOKI)} + C(6)*\text{OPINI_KABOKI} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(PDRB_KABOKU)} &= C(26) + C(1) + C(2)*\text{LOG(PAD_KABOKU)} + C(3)*\text{LOG(KESH_KABOKU)} + \\ &C(4)*\text{LOG(EDUC_KABOKU)} + C(5)*\text{LOG(PENDDK_KABOKU)} + C(6)*\text{OPINI_KABOKU} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(PDRB_KABBENGSEL)} &= C(27) + C(1) + C(2)*\text{LOG(PAD_KABBENGSEL)} + \\ &C(3)*\text{LOG(KESH_KABBENGSEL)} + C(4)*\text{LOG(EDUC_KABBENGSEL)} + \\ &C(5)*\text{LOG(PENDDK_KABBENGSEL)} + C(6)*\text{OPINI_KABBENGSEL} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(PDRB_KABBENGUTARA)} &= C(28) + C(1) + C(2)*\text{LOG(PAD_KABBENGUTARA)} + \\ &C(3)*\text{LOG(KESH_KABBENGUTARA)} + C(4)*\text{LOG(EDUC_KABBENGUTARA)} + \\ &C(5)*\text{LOG(PENDDK_KABBENGUTARA)} + C(6)*\text{OPINI_KABBENGUTARA} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(PDRB_KABKAUR)} &= C(29) + C(1) + C(2)*\text{LOG(PAD_KABKAUR)} + C(3)*\text{LOG(KESH_KABKAUR)} \\ &+ C(4)*\text{LOG(EDUC_KABKAUR)} + C(5)*\text{LOG(PENDDK_KABKAUR)} + C(6)*\text{OPINI_KABKAUR} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(PDRB_KABKEPAHIANG)} &= C(30) + C(1) + C(2)*\text{LOG(PAD_KABKEPAHIANG)} + \\ &C(3)*\text{LOG(KESH_KABKEPAHIANG)} + C(4)*\text{LOG(EDUC_KABKEPAHIANG)} + \\ &C(5)*\text{LOG(PENDDK_KABKEPAHIANG)} + C(6)*\text{OPINI_KABKEPAHIANG} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(PDRB_KABLAMPTENG)} &= C(31) + C(1) + C(2)*\text{LOG(PAD_KABLAMPTENG)} + \\ &C(3)*\text{LOG(KESH_KABLAMPTENG)} + C(4)*\text{LOG(EDUC_KABLAMPTENG)} + \\ &C(5)*\text{LOG(PENDDK_KABLAMPTENG)} + C(6)*\text{OPINI_KABLAMPTENG} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(PDRB_KABSUKABUMI)} &= C(32) + C(1) + C(2)*\text{LOG(PAD_KABSUKABUMI)} + \\ &C(3)*\text{LOG(KESH_KABSUKABUMI)} + C(4)*\text{LOG(EDUC_KABSUKABUMI)} + \\ &C(5)*\text{LOG(PENDDK_KABSUKABUMI)} + C(6)*\text{OPINI_KABSUKABUMI} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(PDRB_KABBREBES)} &= C(33) + C(1) + C(2)*\text{LOG(PAD_KABBREBES)} + \\ &C(3)*\text{LOG(KESH_KABBREBES)} + C(4)*\text{LOG(EDUC_KABBREBES)} + \\ &C(5)*\text{LOG(PENDDK_KABBREBES)} + C(6)*\text{OPINI_KABBREBES} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(PDRB_KABMAGELANG)} &= C(34) + C(1) + C(2)*\text{LOG(PAD_KABMAGELANG)} + \\ &C(3)*\text{LOG(KESH_KABMAGELANG)} + C(4)*\text{LOG(EDUC_KABMAGELANG)} + \\ &C(5)*\text{LOG(PENDDK_KABMAGELANG)} + C(6)*\text{OPINI_KABMAGELANG} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(PDRB_KOTASURAKARTA)} &= C(35) + C(1) + C(2)*\text{LOG(PAD_KOTASURAKARTA)} + \\ &C(3)*\text{LOG(KESH_KOTASURAKARTA)} + C(4)*\text{LOG(EDUC_KOTASURAKARTA)} + \\ &C(5)*\text{LOG(PENDDK_KOTASURAKARTA)} + C(6)*\text{OPINI_KOTASURAKARTA} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(PDRB_KABKULONPROGO)} &= C(36) + C(1) + C(2)*\text{LOG(PAD_KABKULONPROGO)} + \\ &C(3)*\text{LOG(KESH_KABKULONPROGO)} + C(4)*\text{LOG(EDUC_KABKULONPROGO)} + \\ &C(5)*\text{LOG(PENDDK_KABKULONPROGO)} + C(6)*\text{OPINI_KABKULONPROGO} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(PDRB_KABBLITAR)} &= C(37) + C(1) + C(2)*\text{LOG(PAD_KABBLITAR)} + \\ &C(3)*\text{LOG(KESH_KABBLITAR)} + C(4)*\text{LOG(EDUC_KABBLITAR)} + C(5)*\text{LOG(PENDDK_KABBLITAR)} \\ &+ C(6)*\text{OPINI_KABBLITAR} \end{aligned}$$

Substituted Coefficients:

=====

$$\begin{aligned} \text{LOG(PDRB_KABACEHBES)} &= 0.0860582327745 - 22.1555179555 + \\ &0.0783539096826*\text{LOG(PAD_KABACEHBES)} - 0.00161241782407*\text{LOG(KESH_KABACEHBES)} - \\ &0.00847812474592*\text{LOG(EDUC_KABACEHBES)} + 2.29133670213*\text{LOG(PENDDK_KABACEHBES)} - \\ &0.0244565697775*\text{OPINI_KABACEHBES} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(PDRB_KABACEHTENG)} &= 0.473446461025 - 22.1555179555 + \\ &0.0783539096826*\text{LOG(PAD_KABACEHTENG)} - 0.00161241782407*\text{LOG(KESH_KABACEHTENG)} - \\ &0.00847812474592*\text{LOG(EDUC_KABACEHTENG)} + \\ &2.29133670213*\text{LOG(PENDDK_KABACEHTENG)} - 0.0244565697775*\text{OPINI_KABACEHTENG} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(PDRB_KABBIREUEN)} &= -0.0802587483244 - 22.1555179555 + \\ &0.0783539096826*\text{LOG(PAD_KABBIREUEN)} - 0.00161241782407*\text{LOG(KESH_KABBIREUEN)} - \\ &0.00847812474592*\text{LOG(EDUC_KABBIREUEN)} + 2.29133670213*\text{LOG(PENDDK_KABBIREUEN)} - \\ &0.0244565697775*\text{OPINI_KABBIREUEN} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(PDRB_KABASAHAN)} &= -0.531424788604 - 22.1555179555 + \\ &0.0783539096826*\text{LOG(PAD_KABASAHAN)} - 0.00161241782407*\text{LOG(KESH_KABASAHAN)} - \\ &0.00847812474592*\text{LOG(EDUC_KABASAHAN)} + 2.29133670213*\text{LOG(PENDDK_KABASAHAN)} - \\ &0.0244565697775*\text{OPINI_KABASAHAN} \end{aligned}$$

LOG(PDRB_KABDAIRI) = 0.598697980389 - 22.1555179555 +
0.0783539096826*LOG(PAD_KABDAIRI) - 0.00161241782407*LOG(KESH_KABDAIRI) -
0.00847812474592*LOG(EDUC_KABDAIRI) + 2.29133670213*LOG(PENDDK_KABDAIRI) -
0.0244565697775*OPINI_KABDAIRI

LOG(PDRB_KABDELISERDANG) = -1.96787760662 - 22.1555179555 +
0.0783539096826*LOG(PAD_KABDELISERDANG) -
0.00161241782407*LOG(KESH_KABDELISERDANG) -
0.00847812474592*LOG(EDUC_KABDELISERDANG) +
2.29133670213*LOG(PENDDK_KABDELISERDANG) - 0.0244565697775*OPINI_KABDELISERDANG

LOG(PDRB_KABAGAM) = -0.198519260022 - 22.1555179555 +
0.0783539096826*LOG(PAD_KABAGAM) - 0.00161241782407*LOG(KESH_KABAGAM) -
0.00847812474592*LOG(EDUC_KABAGAM) + 2.29133670213*LOG(PENDDK_KABAGAM) -
0.0244565697775*OPINI_KABAGAM

LOG(PDRB_KABPASAMAN) = 0.3246726023 - 22.1555179555 +
0.0783539096826*LOG(PAD_KABPASAMAN) - 0.00161241782407*LOG(KESH_KABPASAMAN) -
0.00847812474592*LOG(EDUC_KABPASAMAN) + 2.29133670213*LOG(PENDDK_KABPASAMAN) -
0.0244565697775*OPINI_KABPASAMAN

LOG(PDRB_KOTAPADANG) = -0.355529198303 - 22.1555179555 +
0.0783539096826*LOG(PAD_KOTAPADANG) - 0.00161241782407*LOG(KESH_KOTAPADANG) -
0.00847812474592*LOG(EDUC_KOTAPADANG) + 2.29133670213*LOG(PENDDK_KOTAPADANG) -
0.0244565697775*OPINI_KOTAPADANG

LOG(PDRB_KOTAPAYAKUMBUH) = 1.6239894857 - 22.1555179555 +
0.0783539096826*LOG(PAD_KOTAPAYAKUMBUH) -
0.00161241782407*LOG(KESH_KOTAPAYAKUMBUH) -
0.00847812474592*LOG(EDUC_KOTAPAYAKUMBUH) +
2.29133670213*LOG(PENDDK_KOTAPAYAKUMBUH) -
0.0244565697775*OPINI_KOTAPAYAKUMBUH

LOG(PDRB_KOTASAWAHLUNTO) = 2.75196356463 - 22.1555179555 +
0.0783539096826*LOG(PAD_KOTASAWAHLUNTO) -
0.00161241782407*LOG(KESH_KOTASAWAHLUNTO) -
0.00847812474592*LOG(EDUC_KOTASAWAHLUNTO) +
2.29133670213*LOG(PENDDK_KOTASAWAHLUNTO) -
0.0244565697775*OPINI_KOTASAWAHLUNTO

LOG(PDRB_KABBENGKALIS) = 1.45498955092 - 22.1555179555 +
0.0783539096826*LOG(PAD_KABBENGKALIS) - 0.00161241782407*LOG(KESH_KABBENGKALIS) -
0.00847812474592*LOG(EDUC_KABBENGKALIS) +
2.29133670213*LOG(PENDDK_KABBENGKALIS) - 0.0244565697775*OPINI_KABBENGKALIS

LOG(PDRB_KABKAMPAR) = -0.253036491869 - 22.1555179555 +
0.0783539096826*LOG(PAD_KABKAMPAR) - 0.00161241782407*LOG(KESH_KABKAMPAR) -
0.00847812474592*LOG(EDUC_KABKAMPAR) + 2.29133670213*LOG(PENDDK_KABKAMPAR) -
0.0244565697775*OPINI_KABKAMPAR

LOG(PDRB_KABMERANGIN) = -0.484388533497 - 22.1555179555 +
0.0783539096826*LOG(PAD_KABMERANGIN) - 0.00161241782407*LOG(KESH_KABMERANGIN) -
0.00847812474592*LOG(EDUC_KABMERANGIN) + 2.29133670213*LOG(PENDDK_KABMERANGIN) -
0.0244565697775*OPINI_KABMERANGIN

LOG(PDRB_KABTEBO) = -0.462611238118 - 22.1555179555 +
0.0783539096826*LOG(PAD_KABTEBO) - 0.00161241782407*LOG(KESH_KABTEBO) -
0.00847812474592*LOG(EDUC_KABTEBO) + 2.29133670213*LOG(PENDDK_KABTEBO) -
0.0244565697775*OPINI_KABTEBO

LOG(PDRB_KABLAHAT) = 0.0734515502985 - 22.1555179555 +
0.0783539096826*LOG(PAD_KABLAHAT) - 0.00161241782407*LOG(KESH_KABLAHAT) -
0.00847812474592*LOG(EDUC_KABLAHAT) + 2.29133670213*LOG(PENDDK_KABLAHAT) -
0.0244565697775*OPINI_KABLAHAT

LOG(PDRB_KABMUSIRAWAS) = -0.625096054138 - 22.1555179555 +
0.0783539096826*LOG(PAD_KABMUSIRAWAS) - 0.00161241782407*LOG(KESH_KABMUSIRAWAS)

- 0.00847812474592*LOG(EDUC_KABMUSIRAWAS) +
2.29133670213*LOG(PENDDK_KABMUSIRAWAS) - 0.0244565697775*OPINI_KABMUSIRAWAS

LOG(PDRB_KABMUARAENIM) = -0.447217017603 - 22.1555179555 +
0.0783539096826*LOG(PAD_KABMUARAENIM) - 0.00161241782407*LOG(KESH_KABMUARAENIM)
- 0.00847812474592*LOG(EDUC_KABMUARAENIM) +
2.29133670213*LOG(PENDDK_KABMUARAENIM) - 0.0244565697775*OPINI_KABMUARAENIM

LOG(PDRB_KABOKI) = -1.19860434024 - 22.1555179555 + 0.0783539096826*LOG(PAD_KABOKI) -
0.00161241782407*LOG(KESH_KABOKI) - 0.00847812474592*LOG(EDUC_KABOKI) +
2.29133670213*LOG(PENDDK_KABOKI) - 0.0244565697775*OPINI_KABOKI

LOG(PDRB_KABOKU) = 0.458230251245 - 22.1555179555 + 0.0783539096826*LOG(PAD_KABOKU)
- 0.00161241782407*LOG(KESH_KABOKU) - 0.00847812474592*LOG(EDUC_KABOKU) +
2.29133670213*LOG(PENDDK_KABOKU) - 0.0244565697775*OPINI_KABOKU

LOG(PDRB_KABBENGSEL) = 0.792433046778 - 22.1555179555 +
0.0783539096826*LOG(PAD_KABBENGSEL) - 0.00161241782407*LOG(KESH_KABBENGSEL) -
0.00847812474592*LOG(EDUC_KABBENGSEL) + 2.29133670213*LOG(PENDDK_KABBENGSEL) -
0.0244565697775*OPINI_KABBENGSEL

LOG(PDRB_KABBENGUTARA) = -0.238574813339 - 22.1555179555 +
0.0783539096826*LOG(PAD_KABBENGUTARA) -
0.00161241782407*LOG(KESH_KABBENGUTARA) -
0.00847812474592*LOG(EDUC_KABBENGUTARA) +
2.29133670213*LOG(PENDDK_KABBENGUTARA) - 0.0244565697775*OPINI_KABBENGUTARA

LOG(PDRB_KABKAUR) = 0.66467803525 - 22.1555179555 +
0.0783539096826*LOG(PAD_KABKAUR) - 0.00161241782407*LOG(KESH_KABKAUR) -
0.00847812474592*LOG(EDUC_KABKAUR) + 2.29133670213*LOG(PENDDK_KABKAUR) -
0.0244565697775*OPINI_KABKAUR

LOG(PDRB_KABKEPAHIANG) = 1.36412051562 - 22.1555179555 +
0.0783539096826*LOG(PAD_KABKEPAHIANG) - 0.00161241782407*LOG(KESH_KABKEPAHIANG) -
0.00847812474592*LOG(EDUC_KABKEPAHIANG) +
2.29133670213*LOG(PENDDK_KABKEPAHIANG) - 0.0244565697775*OPINI_KABKEPAHIANG

LOG(PDRB_KABLAMPTENG) = -1.72015655798 - 22.1555179555 +
0.0783539096826*LOG(PAD_KABLAMPTENG) - 0.00161241782407*LOG(KESH_KABLAMPTENG) -
0.00847812474592*LOG(EDUC_KABLAMPTENG) +
2.29133670213*LOG(PENDDK_KABLAMPTENG) - 0.0244565697775*OPINI_KABLAMPTENG

LOG(PDRB_KABSUKABUMI) = 0.133963239382 - 22.1555179555 +
0.0783539096826*LOG(PAD_KABSUKABUMI) - 0.00161241782407*LOG(KESH_KABSUKABUMI) -
0.00847812474592*LOG(EDUC_KABSUKABUMI) + 2.29133670213*LOG(PENDDK_KABSUKABUMI)
- 0.0244565697775*OPINI_KABSUKABUMI

LOG(PDRB_KABBREBES) = -2.7756195119 - 22.1555179555 +
0.0783539096826*LOG(PAD_KABBREBES) - 0.00161241782407*LOG(KESH_KABBREBES) -
0.00847812474592*LOG(EDUC_KABBREBES) + 2.29133670213*LOG(PENDDK_KABBREBES) -
0.0244565697775*OPINI_KABBREBES

LOG(PDRB_KABMAGELANG) = -2.19950305491 - 22.1555179555 +
0.0783539096826*LOG(PAD_KABMAGELANG) - 0.00161241782407*LOG(KESH_KABMAGELANG) -
0.00847812474592*LOG(EDUC_KABMAGELANG) +
2.29133670213*LOG(PENDDK_KABMAGELANG) - 0.0244565697775*OPINI_KABMAGELANG

LOG(PDRB_KOTASURAKARTA) = 0.00611831309213 - 22.1555179555 +
0.0783539096826*LOG(PAD_KOTASURAKARTA) -
0.00161241782407*LOG(KESH_KOTASURAKARTA) -
0.00847812474592*LOG(EDUC_KOTASURAKARTA) +
2.29133670213*LOG(PENDDK_KOTASURAKARTA) - 0.0244565697775*OPINI_KOTASURAKARTA

LOG(PDRB_KABKULONPROGO) = -0.465693545468 - 22.1555179555 +
0.0783539096826*LOG(PAD_KABKULONPROGO) -
0.00161241782407*LOG(KESH_KABKULONPROGO) -

0.00847812474592*LOG(EDUC_KABKULONPROGO) +
2.29133670213*LOG(PENDDK_KABKULONPROGO) - 0.0244565697775*OPINI_KABKULONPROGO

LOG(PDRB_KABBLITAR) = 3.19729793154 - 22.1555179555 +
0.0783539096826*LOG(PAD_KABBLITAR) - 0.00161241782407*LOG(KESH_KABBLITAR) -
0.00847812474592*LOG(EDUC_KABBLITAR) + 2.29133670213*LOG(PENDDK_KABBLITAR) -
0.0244565697775*OPINI_KABBLITAR

:

DAFTAR PUSTAKA

- Halim Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
- Barro, Robert J., "A Cross-Country Study of Growth, Saving, and Government," National Bureau of Economic Research, working paper No. 2855, February 1989.
- , "Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth," *Journal of Political Economy*, XCVIII (1990), S103-25.
- , and Gary S. Becker, "Fertility Choice in a Model of Economic Growth," *Econometrica*, LVII (1989), 481-501.
- , and Xavier Sala i Martin, "Economic Growth and Convergence across the United States," National Bureau of Economic Research, working paper, July 1990.
- , and , "The Neoclassical Growth Model," Chapter 1 of unpublished manuscript, 1991.
- , and Holger C. Wolf, "Data Appendix for Economic Growth in a Cross Section of Countries," unpublished, National Bureau of Economic Research, November 1989.
- David E. Bloom, David Canning, Linlin Hub, Yuanli Liu, Ajay Mahal, Winnie Yip, 2010, **The contribution of population health and demographic change to economic growth in China and India**, *Journal of Comparative Economics* 38 (2010) 17–33
- Gujarati, Damodar N. 2003. Basic Econometrics. 4th Edition. McGraw-Hill, New York, USA.
- Gujarati, Damodar, 1995. Ekonometrika Dasar. Penerbit Erlangga, Jakarta
- Kwabena Gyimah-Brempong, 2002, **Corruption, economic growth, and income inequality in Africa**, *Econ. Gov.* (2002) 3: 183–209
- Kevin Sylwester, 2000, **Income inequality, education expenditures, and growth**, *Journal of Development Economics* Vol. 63 _2000. 379–398
- N. Gregory Mankiw, David Romer, David N. Weil, 1992, **A Contribution to the Empirics of Economic Growth**, *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 107, No. 2 (May, 1992), pp. 407-437
- Paolo Mauro, 1995, **Corruption and Growth**, *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 110, No. 3 (Aug., 1995), pp. 681-712.
- Rock-Antoine Mehanna, **The Temporal Causality Between Investment And Growth In Developing Economies**, *Journal Of Business And Economics Research* Volume 1, Number 3, p. 85-91.
- Suleiman A.S. Aruwa, 2012, **Public finances and economic growth in Nigeria**, *Public and Municipal Finance*, Volume 1, Issue 2, 2012, pp. 29-36
- Sadono Sukirno, 1994. **Pengantar Teori Ekonomi Makro**. Penerbit RajaGrafindo, Jakarta
- Sukirno, 2007. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Penerbit Kencana Prenada Media Group; Jakarta.

Tambunan, Tulus T.H. (2001), **Perekonomian Indonesia** : Teori dan Temuan Empiris, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Todaro M.P. 2006. **Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga**, Penerbit Erlangga, Jakarta.

LAMPIRAN

No	Uraian	Tahun	PDRB	PAD	KESH	EDUC	PENDDK	OPINI
1	Kab. Aceh Besar	2011	2618	49580	76645	276749	359044	3
		2012	2736	54798	88564	322021	366441	5
		2013	2860	76107	103974	373068	373989	5
		2014	2980	65393	128282	448246	381694	5
2	Kab. Aceh Tenggara	2011	789	11910	49352	176435	182895	3
		2012	832	25324	61578	191832	186662	3
		2013	874	25621	80620	231869	190508	3
		2014	917	45020	109797	267024	194432	3
3	Kab. Bireuen	2011	2775	16817	68262	350115	397736	3
		2012	2930	22942	87755	391674	405930	3
		2013	3067	93893	161966	426641	414292	3
		2014	3216	116740	184149	490881	422826	5
4	Kab. Asahan	2011	5680	31844	71845	405514	677892	3
		2012	6252	37895	73872	388755	687315	3
		2013	6532	53692	88562	461563	696868	3
		2014	7007	59130	96684	483583	706555	4
5	Kab. Dairi	2011	2159	17673	53226	256231	273941	3
		2012	2276	20912	66312	263658	277748	3
		2013	2400	29933	100272	320269	281609	3
		2014	2519	24331	88000	310431	285523	5
6	Kab. Deli Serdang	2011	15389	213792	157851	789927	1816205	1
		2012	16322	291018	189578	876546	1841450	2
		2013	18410	328348	222363	1053278	1867046	1
		2014	19728	566665	345785	1225111	1892998	3
7	Kab. Agam	2011	3280	37894	85700	207100	461157	3
		2012	3503	41573	77002	487477	467337	4
		2013	3726	49954	89959	563833	473599	4
		2014	3949	60156	115316	591055	479945	5
8	Kab. Pasaman	2011	1453	25782	19767	147319	256810	3
		2012	1542	33037	63481	267390	260251	3
		2013	1637	46024	86504	217514	263738	4
		2014	1728	40303	106494	256080	267272	4
9	Kota Padang	2011	12792	149875	51494	251145	845115	3
		2012	13638	189451	94691	701660	856440	4
		2013	14517	238872	111113	749009	867916	3
		2014	15374	315065	214291	965407	879546	4
10	Kota Payakumbuh	2011	931	44561	56558	181933	118444	3
		2012	994	50709	61768	173898	120031	3
		2013	1061	54178	69071	204957	121640	3
		2014	1125	60966	77254	220579	123270	4

No	Uraian	Tahun	PDRB	PAD	KESH	EDUC	PENDDK	OPINI
11	Kota Sawahlunto	2011	550	36382	29924	117740	57654	3
		2012	583	34888	48750	115115	58427	3
		2013	618	37105	69323	114067	59210	3
		2014	652	43672	80926	148674	60003	3
12	Kab. Bengkulu	2011	30398	206232	77279	226454	512404	1
		2012	29894	205980	214016	831600	525931	3
		2013	28038	181667	260552	956801	539816	4
		2014	27083	281447	308548	979685	554067	4
13	Kab. Kampar	2011	9730	96909	196740	173464	707632	3
		2012	10247	110077	118949	690912	726313	3
		2013	10723	157869	145779	792469	745488	3
		2014	11226	120637	186907	890716	765169	3
14	Kab. Merangin	2011	1267	39648	41073	226476	339665	3
		2012	1349	30113	61779	273897	345949	3
		2013	1436	44396	61825	369718	352349	3
		2014	1520	47761	89818	364392	358868	3
15	Kab. Tebo	2011	971	19538	156129	482977	303507	3
		2012	1037	26939	45981	236053	309122	3
		2013	1104	34331	60355	240380	314840	3
		2014	1170	35179	64622	281925	320665	3
16	Kab. Lahat	2011	2892	70066	78180	241333	375738	3
		2012	3068	70938	109854	394859	381374	3
		2013	3237	78313	124004	446440	387094	3
		2014	3411	79066	141347	527714	392901	4
17	Kab. Musi Rawas	2011	3859	65428	41556	115498	533694	3
		2012	4063	73018	108720	316514	541700	3
		2013	3155	75367	135888	379423	549825	3
		2014	2988	81732	110520	246521	558073	5
18	Kab. Muara Enim	2011	8940	86937	46581	190462	727840	3
		2012	9393	119456	232765	516157	738758	3
		2013	8261	125111	178107	560861	749839	4
		2014	8186	133627	190015	558881	761087	5
19	Kab. Ogan Komering Ilir	2011	3544	47387	88183	369796	738707	5
		2012	3777	54618	118083	453955	749788	5
		2013	4021	68701	127529	517621	761035	5
		2014	4258	62449	130359	552619	772450	5
20	Kab. Ogan Komering Ulu	2011	3012	42120	68943	368118	329093	3
		2012	3232	41429	80046	250927	334029	3
		2013	3435	44680	105530	331631	339040	3
		2014	3649	68959	121726	339412	344125	3
21	Kab. Bengkulu Selatan	2011	607	14758	45585	123729	145518	3
		2012	646	18911	69174	224675	148051	3
		2013	689	25454	74456	248919	150627	3

No	Uraian	Tahun	PDRB	PAD	KESH	EDUC	PENDDK	OPINI
		2014	729	19766	78136	297080	153247	5
22	Kab. Bengkulu Utara	2011	847	19099	23196	96748	262360	3
		2012	896	24694	66836	235612	266925	5
		2013	946	30114	96263	239563	271569	5
		2014	995	37907	96409	289128	276295	5
		2011	259	6811	70959	262931	109861	5
23	Kab. Kaur	2012	273	7782	34071	126979	111772	5
		2013	289	10339	35995	135315	113717	5
		2014	304	12659	47517	152500	115696	5
		2011	798	11990	85484	547745	127135	3
24	Kab. Kepahiang	2012	849	13896	37983	130889	129347	1
		2013	900	19468	51699	161454	131598	3
		2014	951	17974	58902	167883	133888	3
		2011	6587	50569	88101	555839	1185943	3
25	Kab. Lampung Tengah	2012	7007	101060	11197	784643	1200886	5
		2013	7436	81780	100759	820503	1216018	3
		2014	7859	109937	124002	969278	1231339	3
		2011	2042	151826	59187	390192	303592	3
26	Kab. Sukabumi	2012	2150	185191	291562	916725	308389	3
		2013	2255	175539	277299	786374	313261	3
		2014	2362	355346	392163	795358	318211	5
		2011	5781	78276	110835	686796	1748383	3
27	Kab. Brebes	2012	6082	101807	152288	730893	1762719	3
		2013	6390	133836	206765	930998	1777174	3
		2014	6693	153414	231708	913057	1791746	3
		2011	4292	90463	113140	550834	1191615	3
28	Kab. Magelang	2012	4543	123723	111523	207639	1201386	3
		2013	4797	173254	142334	863392	1211237	3
		2014	5049	134564	152856	953024	1221170	3
		2011	5412	181097	90301	402045	503517	5
29	Kota Surakarta	2012	5743	231672	98489	514297	507646	5
		2013	6081	298401	121791	546251	511808	5
		2014	6414	297027	124126	651021	516005	5
		2011	1869	53752	85362	618701	393679	3
30	Kab. Kulon Progo	2012	1963	74029	109131	448020	398403	3
		2013	2062	95992	117911	461433	403183	4
		2014	2158	92815	133000	498901	408022	4
		2011	6082	76191	154304	714505	132894	3
31	Kab. Blitar	2012	6468	95782	78795	188249	133811	3
		2013	6868	115671	86255	222894	134735	3
		2014	7259	135078	89116	243247	135664	3

Sumber :

1. BPS Berbagai terbitan (diolah)
2. IHLK BPK berbagai terbitan

UJI HETEROSKEDASTISITAS

Dependent Variable: LOG(RESID?²)
 Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 08/13/16 Time: 09:26
 Sample: 2011 2014
 Included observations: 4
 Cross-sections included: 31
 Total pool (balanced) observations: 124
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.795696	7.600029	-0.894167	0.3731
LOG(PAD?)	0.014866	0.382014	0.038914	0.9690
LOG(KESH?)	-0.185079	0.334128	-0.553918	0.5807
LOG(EDUC?)	0.354228	0.382722	0.925549	0.3566
LOG(PENDDK?)	0.004501	0.662048	0.006799	0.9946
OPINI?	0.402239	0.177417	2.267196	0.0252
Random Effects (Cross)				
_KABACEHBES--C	-4.950785			
_KABACEHTENG--C	1.241917			
_KABBIREUEN--C	-2.295860			
_KABASAHAN--C	-0.051620			
_KABDAIRI--C	-0.138120			
_KABDELISERDANG--C	-3.133273			
_KABAGAM--C	-4.060522			
_KABPASAMAN--C	-0.985671			
_KOTAPADANG--C	1.527821			
_KOTAPAYAKUMBUH--C	-1.351079			
_KOTASAWAHLUNTO--C	0.973872			
_KABBENGKALIS--C	3.847689			
_KABKAMPAR--C	1.602407			
_KABMERANGIN--C	1.796780			
_KABTEBO--C	2.162766			
_KABLAHAT--C	-3.844149			
_KABMUSIRAWAS--C	-1.429490			
_KABMUARAENIM--C	0.579330			
_KABOKI--C	-0.105635			
_KABOKU--C	0.495733			
_KABBENGSEL--C	0.908624			
_KABBENGUTARA--C	1.607554			
_KABKAUR--C	1.892492			
_KABKEPAHIANG--C	-4.597549			
_KABLAMPTENG--C	-0.356479			
_KABSUKABUMI--C	-0.234917			
_KABBREBES--C	2.288043			
_KABMAGELANG--C	2.188379			
_KOTASURAKARTA--C	-0.555981			
_KABKULONPROGO--C	0.966804			
_KABBLITAR--C	4.010918			

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		2.577932	0.8460
Idiosyncratic random		1.099919	0.1540

Weighted Statistics

R-squared	0.069521	Mean dependent var	-0.577035
Adjusted R-squared	0.030094	S.D. dependent var	1.118575
S.E. of regression	1.101615	Sum squared resid	143.1995
F-statistic	1.763292	Durbin-Watson stat	1.159702
Prob(F-statistic)	0.125689		

Unweighted Statistics

R-squared	0.016189	Mean dependent var	-2.765716
Sum squared resid	821.0612	Durbin-Watson stat	0.202261

Model common effect

Dependent Variable: LOG(PDRB?)
Method: Pooled Least Squares
Date: 08/12/16 Time: 23:19
Sample: 2011 2014
Included observations: 4
Cross-sections included: 31
Total pool (balanced) observations: 124

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.073707	1.049039	-5.789779	0.0000
LOG(PAD?)	0.626191	0.077517	8.078078	0.0000
LOG(KESH?)	-0.033029	0.124984	-0.264270	0.7920
LOG(EDUC?)	0.078158	0.142827	0.547221	0.5853
LOG(PENDDK?)	0.539554	0.087343	6.177437	0.0000
OPINI?	-0.120234	0.049481	-2.429906	0.0166
R-squared	0.784428	Mean dependent var		7.979943
Adjusted R-squared	0.775293	S.D. dependent var		1.069990
S.E. of regression	0.507210	Akaike info criterion		1.527395
Sum squared resid	30.35694	Schwarz criterion		1.663860
Log likelihood	-88.69848	Hannan-Quinn criter.		1.582830
F-statistic	85.87597	Durbin-Watson stat		0.119327
Prob(F-statistic)	0.000000			

Model Fixed Effect

Dependent Variable: LOG(PDRB?)
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Date: 08/12/16 Time: 23:21
Sample: 2011 2014
Included observations: 4
Cross-sections included: 31
Total pool (balanced) observations: 124
Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-26.37030	2.035950	-12.95233	0.0000
LOG(PAD?)	0.055386	0.013214	4.191523	0.0001
LOG(KESH?)	0.007851	0.005073	1.547556	0.1253
LOG(EDUC?)	-0.006467	0.007484	-0.864135	0.3899
LOG(PENDDK?)	2.623983	0.167768	15.64058	0.0000
OPINI?	-0.008928	0.004154	-2.149292	0.0344
Fixed Effects (Cross)				
_KABACEHBES--C	0.084405			
_KABACEHTENG--C	0.702308			
_KABBIREUEN--C	-0.109040			
_KABASAHAN--C	-0.727835			
_KABDAIRI--C	0.686287			
_KABDELISERDANG--C	-2.433721			
_KABAGAM--C	-0.277909			
_KABPASAMAN--C	0.447058			
_KOTAPADANG--C	-0.595472			
_KOTAPAYAKUMBUH--C	2.015690			
_KOTASAWAHLUNTO--C	3.382511			
_KABBENGKALIS--C	1.377055			
_KABKAMPAR--C	-0.449850			
_KABMERANGIN--C	-0.448193			
_KABTEBO--C	-0.398495			
_KABLAHAT--C	0.082151			
_KABMUSIRAWAS--C	-0.734441			
_KABMUARAENIM--C	-0.658557			
_KABOKI--C	-1.448518			
_KABOKU--C	0.507054			
_KABBENGSEL--C	1.086849			
_KABBENGUTARA--C	-0.147329			
_KABKAUR--C	1.016108			
_KABKEPAHIANG--C	1.715432			
_KABLAMPTENG--C	-2.089658			
_KABSUKABUMI--C	0.225399			
_KABBREBES--C	-3.267010			
_KABMAGELANG--C	-2.557368			
_KOTASURAKARTA--C	-0.079176			
_KABKULONPROGO--C	-0.474557			
_KABBLITAR--C	3.568822			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.999863	Mean dependent var	15.68899
Adjusted R-squared	0.999809	S.D. dependent var	10.63672
S.E. of regression	0.045077	Sum squared resid	0.178812
F-statistic	18384.13	Durbin-Watson stat	1.110336
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.998113	Mean dependent var	7.979943
Sum squared resid	0.265741	Durbin-Watson stat	1.012319

Model Random Effect

Dependent Variable: LOG(PDRB?)
 Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 08/12/16 Time: 23:23
 Sample: 2011 2014
 Included observations: 4
 Cross-sections included: 31
 Total pool (balanced) observations: 124
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.180709	1.436591	-4.302344	0.0000
LOG(PAD?)	0.134391	0.021281	6.314965	0.0000
LOG(KESH?)	0.006934	0.016264	0.426359	0.6706
LOG(EDUC?)	0.001521	0.018637	0.081629	0.9351
LOG(PENDDK?)	0.982667	0.117329	8.375338	0.0000
OPINI?	-0.018560	0.009077	-2.044744	0.0431
Random Effects (Cross)				
_KABACEHBES--C	0.021219			
_KABACEHTENG--C	-0.405460			
_KABBIREUEN--C	0.007956			
_KABASAHAN--C	0.246327			
_KABDAIRI--C	0.231407			
_KABDELISERDANG--C	-0.019640			
_KABAGAM--C	0.066396			
_KABPASAMAN--C	-0.147036			
_KOTAPADANG--C	0.613597			
_KOTAPAYAKUMBUH--C	0.118622			
_KOTASAWAHLUNTO--C	0.329717			
_KABBENGKALIS--C	1.788116			
_KABKAMPAR--C	0.542233			
_KABMERANGIN--C	-0.586638			
_KABTEBO--C	-0.693807			
_KABLAHAT--C	0.050949			
_KABMUSIRAWAS--C	-0.182206			
_KABMUARAENIM--C	0.364901			
_KABOKI--C	-0.333715			
_KABOKU--C	0.291117			
_KABBENGSEL--C	-0.381243			
_KABBENGUTARA--C	-0.663748			
_KABKAUR--C	-0.836515			
_KABKEPAHIANG--C	0.032353			
_KABLAMPTENG--C	-0.250954			
_KABSUKABUMI--C	-0.234550			
_KABBREBES--C	-0.829867			
_KABMAGELANG--C	-0.756105			
_KOTASURAKARTA--C	0.272744			
_KABKULONPROGO--C	-0.437757			
_KABBLITAR--C	1.781586			

Effects Specification		
	S.D.	Rho
Cross-section random	0.529009	0.9902
Idiosyncratic random	0.052681	0.0098

Weighted Statistics

R-squared	0.578168	Mean dependent var	0.396848
Adjusted R-squared	0.560294	S.D. dependent var	0.085753
S.E. of regression	0.056863	Sum squared resid	0.381546
F-statistic	32.34642	Durbin-Watson stat	0.887163
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.667205	Mean dependent var	7.979943
Sum squared resid	46.86423	Durbin-Watson stat	0.007223
